

ADB

KEBANGKITAN REGIONALISME ASIA

Kemitraan bagi Kemakmuran Bersama



INTISARI

Asian Development Bank

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris.
© 2008 Asian Development Bank

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Diterbitkan 2008.
Dicetak di Filipina.



Dicetak menggunakan tinta berbahan dasar minyak sayur dengan kertas daur ulang yang dibuat melalui proses yang sama sekali bebas klorin.

Katalog Dalam Terbitan

Stok Penerbitan No BBK113008
ISBN 978-971-561-668-3

Kebangkitan Regionalisme Asia: kemitraan bagi Kemakmuran Bersama –
Intisari
Mandaluyong City, Phil.:Asian Development Bank, 2008.

Dokumen ini diterjemahkan dari bahasa Inggris agar dapat dibaca oleh lebih banyak orang. Tetapi bahasa Inggris adalah bahasa resmi Asian Development Bank (ADB/Bank Pembangunan Asia) dan dokumen asli dalam bahasa Inggris merupakan satu-satunya teks yang autentik (yaitu, resmi dan merupakan sumber yang berwenang). Setiap kutipan harus mengacu pada teks asli dalam bahasa Inggris dari dokumen ini. ADB tidak menjamin akurasi penerjemahan dan tidak bertanggungjawab atas penyimpangan dari teks asli.

Pandangan yang disampaikan dalam buku ini merupakan pandangan para penulis dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan ADB atau Dewan Gubernur ADB atau pemerintah yang disebut.

ADB tidak menjamin akurasi data yang tercakup dalam penerbitan ini dan tidak bertanggungjawab atas konsekuensi penggunaannya.

Penggunaan istilah “negara” tidak menyiratkan penilaian apapun juga dari para penulis atau ADB akan status hukum atau status lainnya dari entitas teritorial manapun. Simbol “\$” mewakili dolar Amerika Serikat, kecuali kalau disebutkan lain. “Asia” mengacu pada negara anggota ADB. Enam belas (16) negara Asia yakni Brunei Darussalam; Kamboja; Republik Rakyat Cina; Hongkong (Cina); India; Indonesia; Jepang; Republik Korea; Republik Demokrasi Rakyat Laos; Malaysia; Myanmar; Filipina; Singapura; Taipei (Cina); Thailand; dan Vietnam sedang dalam proses berintegrasi secara ekonomi, baik secara formal maupun informal.

ADB menganjurkan agar pencetakan atau penggandaan informasi dari dokumen ini digunakan hanya untuk keperluan pribadi dan tidak komersial dengan sepengetahuan ADB. Dilarang memperjualbelikan, mengedarkan atau membuat karangan berdasarkan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis tegas dari ADB.

Asian Development Bank
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
Tel: +63 2 632 4444
Fax: + 63 2 636 4444
www.adb.org

Prakata



Asia saat ini adalah lokomotif ekonomi. Tetapi kisah sukses Asia tak hanya tentang pembangunan yang pesat, pengurangan kemiskinan dan kelas menengah yang terus berkembang. Ini tak sekedar tentang jaringan produksi dan distribusi yang menempatkan barang-barang Asia dalam jangkauan konsumen di seluruh dunia. Ini juga lebih dari hanya sekedar tentang industri dengan tenaga kerja intensif, barang-barang setengah jadi yang diproduksi dengan teknologi tinggi, atau produk akhir yang dirakit dalam pabrik dan kawasan industri yang tak terhitung jumlahnya.

Yang juga merupakan bagian dari kisah sukses Asia adalah integrasi yang bertumbuh—suatu fenomena yang kian mendapat perhatian dari pengamat di luar kawasan ini, dan yang lebih penting, dari para pengambil kebijakan dan masyarakat yang mereka layani. Kecenderungan akan integrasi ini semakin berkembang melalui dialog intensif antara negara-negara dan masyarakat—mulai dari kontak sederhana yang dibawa oleh pariwisata intraregional hingga pertemuan resmi pejabat pemerintah, menteri dan pimpinan politik. Perdagangan dan investasi intraregional berkembang pesat, pasar keuangan menjadi kian dekat dan lebih efisien, dan negara-negara menjadi lebih saling tergantung. Proyek-proyek infrastruktur regional meningkatkan konektivitas, dan negara bekerja sama untuk menyediakan barang-barang publik regional dalam bidang seperti lingkungan dan kesehatan.

Kebangkitan regionalisme Asia menawarkan platform baru untuk perkembangan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap negara, baik bagi Asia dan juga baik bagi dunia. Ini adalah “kemitraan bagi kemakmuran bersama.”

Pendekatan yang berkembang untuk integrasi di Asia adalah ramah pasar, melalui berbagai jalur (*multi-track*) dan dengan berbagai kecepatan (*multi-speed*), yang memungkinkan dosis yang sehat akan pragmatisme di antara suatu kelompok dengan kepentingan bersama dari negara-negara di kawasan itu. Ini adalah pendekatan yang bisa dilakukan oleh kawasan yang begitu besar dan penuh keragaman serta memiliki beberapa keuntungan. Pertama, setiap kelompok wilayah, negara, atau subwilayah dapat berintegrasi sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing dan kesempatan yang spesifik yang ditawarkan oleh regionalisme. Kedua, dengan menguatnya kemitraan, kelompok-kelompok yang lebih kecil tampaknya mempunyai lebih banyak kemungkinan untuk bergabung menjadi kelompok-kelompok yang lebih besar, sehingga ada hubungan yang lebih luas dan dalam di

seluruh Asia yang terus tumbuh. Ketiga, pendekatan ini meyakinkan bahwa integrasi ekonomi Asia tetap ramah pasar—kerangka kerjanya tetap responsif terhadap kebutuhan sektor swasta sementara ekspansi usaha dan pasar-pasar yang terbuka terus memperkuat negara-negara Asia di masa mendatang.

Kerja sama subregional adalah dasar integrasi regional Asia, dan merupakan jalan logis untuk bergerak maju, mengingat keragaman dan luasnya kawasan ini. Apakah di Subkawasan Mekong Raya (*Greater Mekong Subregion*), Asia Timur dan keseluruhannya, Asia Selatan, Asia Tengah, atau kepulauan Pasifik, jangkauan dan kecepatan kerja sama regional pastilah tak sama. Dengan berkembangnya kemitraan, secara alamiah akan terbentuk jembatan di seluruh perbatasan subkawasan, hingga kemudian mengarah pada kerja sama dan integrasi yang lebih komprehensif. Kerja sama dan integrasi seperti ini terlihat dengan jelas setelah krisis keuangan Asia, yang memicu suatu masa di mana kerja sama regional mengalami kemajuan berarti karena adanya kepentingan bersama dan adanya kesempatan.

Kajian ini menganalisa sifat kebangkitan regionalisme Asia, memberikan dasar bagi pemahaman terhadap dimensi-dimensinya dan diskusi lebih lanjut mengenai jalan untuk maju ke depan. Gaya regionalisme Asia yang dinamis dan berorientasi ke luar dapat memberikan dampak yang cukup penting dalam dunia yang menjadi global. Regionalisme dapat menjadi faktor stabilisasi ketika timbul kejutan (*shock*), apakah diterapkan dalam kawasan itu sendiri atau di dunia luar. Menjadi pragmatis dan fleksibel tak berarti memiliki wawasan *laissez faire* (lepas tangan). Regionalisme membawa tanggung jawab akan pengelolaan yang benar, komunikasi yang efektif, dan, (jika perlu), koordinasi kebijakan atau pendirian institusi regional bersama. Regionalisme juga dapat menjadi alat kebijakan yang efektif untuk membantu pasar menyesuaikan diri dan beradaptasi saat munculnya krisis atau potensi krisis.

Apakah menyediakan barang publik regional yang baru, mengelola bencana alam dan epidemik, memudahkan perdagangan produk dan jasa, memindahkan modal dan orang, membangun posisi yang sama dalam forum internasional, atau bekerja sama dalam pembenahan kegagalan pasar global, kebangkitan regionalisme Asia akan bergantung pada pengalaman, riset dan analisa yang membentuk kajian ini untuk mengembangkan dan mengelola dengan baik strategi yang dapat menangani dengan efektif tantangan-tantangan yang akan dihadapi Asia.

Kajian ini, yang dipimpin oleh Kantor Integrasi Ekonomi Regional, adalah proyek utama departemen pengetahuan ADB. Dokumen ini juga didasarkan pada laporan Kelompok Pakar bulan Maret 2007, yang dalam satu dari tiga temanya yang saling melengkapi, menyarankan agar ADB mengubah fokusnya dari nasional, menjadi

regional dan pada akhirnya global. Kajian ini juga menyumbang kerangka kerja strategis jangka panjang ADB, dengan membantu menentukan relevansi integrasi dan kerja sama regional sebagai platform bagi pengurangan kemiskinan dan promosi perkembangan ekonomi.

Kajian ini memperoleh banyak manfaat dari karya dan sumbangan banyak orang. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam bagi tim penulis, penasehat dan peninjau, baik dari dalam maupun luar ADB, yang turut mengerjakan laporan ini dan memberikan bimbingan dan ide-ide yang inovatif. Konsultan kepala, Peter Petri, mengkoordinasikan karya-karya dari para penulis bab, dan menulis kata pengantar, bab tentang saling ketergantungan yang mendalam, kesimpulan dan *Intisari* ini. Michael Plummer menulis bab integrasi produksi; Jenny Corbett dan Maria Socorro Gochoco-Bautista menulis tentang sistem keuangan; Shinji Takagi, menulis tentang hubungan ekonomi makro; Shiladitya Chatterjee dan Aniceto Orbeta menulis tentang isu-isu sosial dan lingkungan; serta Peter Drysdale menulis tentang arsitektur kerja sama. Philippe Legrain bertindak sebagai editor ekonomi. Kajian ini disusun dan dipimpin oleh tim ADB yang terdiri dari Masahiro Kawai, Jong-Wha Lee, Srinivasa Madhur, dan Giovanni Capannelli. Sumbangan keuangan dari Pemerintah Jepang untuk proyek ini sungguh kami hargai.

Bagaimana regionalisme Asia berkembang akan berdampak pada 3,7 milyar penduduk yang tinggal di kawasan ini dan di dunia secara keseluruhan. Asia semakin banyak memberikan sumbangan bagi ekonomi global daripada kawasan lain. Bangkitnya regionalisme Asia yang diperkuat oleh generasi baru Asia yang dibesarkan di tengah-tengah kemajuan ekonomi yang luar biasa dan kerja sama antar bangsa akan membantu kemakmuran dan perdamaian yang abadi.



Haruhiko Kuroda
Presiden
Asian Development Bank

Ucapan Terima Kasih

Konsep kajian ini dibuat dan dikerjakan oleh tim manajemen ADB yang terdiri dari Masahiro Kawai, mantan Kepala Kantor Integrasi Regional (OREI) yang kini menjabat sebagai Dekan Asian Development Bank Institute (ADBI), Jong-Wha Lee, Srinivasa Madhur, dan Giovanni Capannelli, masing-masing adalah Kepala, Direktur dan Ekonom Senior OREI. Komite Tetap yang terdiri dari Masahiro Kawai, Bindu Lohani, Rajat Nag, Kunio Senga, Kazu Sakai, Ifzal Ali, Jong-Wha Lee dan Ann Quon menyediakan panduan menyeluruh bagi proyek ini.

Tim konsultan eksternal dan staf ADB mempersiapkan draf naskah bab-bab laporan utama dan Intisari. Peter A. Petri dari Universitas Brandeis bertindak sebagai kepala konsultan. Dia terlibat dalam koordinasi kajian secara menyeluruh dan berperan sangat besar dalam menulis laporan akhir kajian. Penulis-penulis berikut ini menulis draf naskah bab-bab yang ada dalam laporan utama: Peter Petri menulis bab 1 (Mengapa Regionalisme Asia?), 2 (Mendalamnya Saling Ketergantungan), dan 8 (Jalan ke Depan); Michael Plummer dari Universitas Johns Hopkins menulis bab 3 (Integrasi Produksi); Jenny Corbett dari Universitas Nasional Australia dan Maria Socorro Gochoco-Bautista dari Universitas Filipina (dengan bantuan R. V. Fabella, M. Debuque-Gonzales, M. S. Milo, dan R. E. Reside, Jr) menulis bab 4 (Integrasi Pasar Keuangan); Shinji Takagi dari Universitas Osaka menulis bab 5 (Mengelola Saling Ketergantungan Ekonomi makro); Shiladitya Chatterjee dari ADB dan Aniceto Orbeta Jr dari Philippine Institute for Development Studies menulis bab 6 (Membuat Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan); dan Peter Drysdale dari Universitas Nasional Australia menulis bab 7 (Menciptakan Arsitektur untuk Kerja Sama). *Intisari* kajian disusun oleh Peter Petri. Philippe Legrain mengerjakan suntingan ekonomi dan mempersiapkan ringkasan eksekutif.

Badan peninjau dan penasehat eksternal memberikan panduan dan mendiskusikan draf naskah-naskah bab serta makalah latar belakang dan analisa yang disiapkan untuk kajian ini selama diselenggarakannya tiga lokakarya terkait kajian ini. Badan ini diketuai oleh Hugh Patrick (Universitas Columbia). Anggota terdiri dari Charles Adams (Universitas Nasional Singapura), Mohamed Ariff (Malaysian Institute of Economic Research); Motoshige Itoh (Universitas Tokyo dan National Institute for Research Advancement, Japan) Rajiv Kumar (Indian Council for Research and International Economic Relations);

Kyung-Tae Lee (Korean Institute of International Economic Policy); Hadi Soesastro (Centre for Strategic and International Studies, Indonesia); Alfred Steinherr (German Institute of Economic Research); Chalongsob Sussangkarn (Thailand Development Research Institute); Josef Yap (Philippine Institute for Development Studies); Yong Ding Yu (Chinese Academy of Social Science); Chia Siow Yue (Singapore Institute of International Affairs); dan Yuen Pau Woo (Asia Pacific Foundation of Canada).

Para penulis makalah latar belakang dan analisa adalah Douglas Arner, Giovanni Capannelli, Ramesh Chandra, Philippa Dee, Barry Eichengreen, Jennifer Francis, Albert Guangzhou Hu, Yiping Huang, Gary Jefferson, Juthathip Jongwanich, Rajiv Kumar, Ronald Lee, Sang-Hyop Lee, Hongzhong Liu, Andrew Mason, Ryuzo Miyao, Mario Lamberte, Keijiro Otsuka, Brahm Prakash, Raza Ahmad, Tetsushi Sonobe dan ZhongXiang Zhang.

Kelompok kerja ADB membaca draf naskah-naskah dan memberi komentar terinci atas tulisan-tulisan bab. Kelompok ini terdiri dari Srinivasa Madhur (ketua), Jaseem Ahmed, Ian Anderson, Indu Bhushan, Giovanni Capannelli, Bruno Carrasco, Padmini Desikachar, Bahodir Ganiev, Klaus Gerhaeusser, David Green, Frank Harrigan, Shigeko Hattori, Jayant Menon, Rita Nangia, Cyn-Young Park, Ashok Sharma, dan Shahid Zahid. Sumbangan tambahan untuk laporan kajian ini dipersiapkan oleh Guy Sacerdoti. Albert Guangzhou Hu, Sabyasachi Mitra, Donghyun Park, Hai Truong Pham, Avonechith Siackhachanh dan Lotte Schou-Zibell menyusun beberapa kotak.

Tim administrasi proyek ini terdiri dari Victoria T. Viterbo-Quimbo (koordinator), Josephine Duque-Comia, Ma.Rosario Razon, dan Ruby Grace Santiago. Bantuan data dan penghitungan diberikan oleh Fidelis Sadicon, Michael Bartolazo, Rogelio Mercado, dan Fidelis Sadicon.

Jill Gale de Villa adalah penyunting naskah dan mengkoordinasikan pekerjaan editorial dan penyusunan huruf di Manila. Michael Cortes dari FandMDesign Inc. mendesain dan mengerjakan karya seni sampul buku untuk *Intisari* dan kajian utama serta menentukan jenis-jenis huruf untuk *Intisari*. Ariel Paelmo menentukan jenis-jenis huruf untuk kajian utama. Eula Mae Gonzales, Erickson Mercado dan Herman Ramos membantu dengan grafis. Carolyn Dedolph Cabrera, Muriel Ordonez and Ma. P. del Rosario membantu dengan sentuhan akhir dan penyuntingan teks. Raveendranath Rajan, Anna Maria Juico, Gregg Garcia, Judy Yniguez, dari bagian pencetakan ADB membantu keperluan praproduksi.

Intisari edisi Bahasa Indonesia dibuat dengan bantuan Ira Setiati dan Hadi Soesastro dari Centre for Strategic and International Studies, Indonesia (suntingan ekonomi), T. Sima Gunawan (terjemahan), Ted Samuel (penyusunan huruf), dan Ayun Sundari dari Kantor Perwakilan ADB di Indonesia (koordinasi).

Singkatan dan Akronim



ABF	- Asian Bond Fund = Dana Obligasi Asia
ABMI	- Asian Bond Market Initiative = Prakarsa Pasar Obligasi Asia
APEC	- Asia-Pacific Economic Cooperation = Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
ASEAN	- Association of Southeast Asian Nations = Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
ASEM	- Asia-Europe Meeting = Pertemuan Asia-Eropa
CMI	- Chiang Mai Initiative = Prakarsa Chiang Mai
EAS	- East Asian Summit = Pertemuan Puncak Asia Timur
ERPD	- Economic Review and Policy Dialogue = Dialog Evaluasi dan Kebijakan Ekonomi
EU	- European Union = Uni Eropa
FTA	- Free Trade Agreement = Kesepakatan Perdagangan Bebas
GDP	- Gross Domestic Product = Produk Domestik Bruto
HIV/AIDS	- Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome = Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia/Sindrom yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia
IMF	- International Monetary Fund = Dana Moneter Internasional
MDG	- Millennium Development Goal = Tujuan Pembangunan Milenium
PRC	- People's Republic of Cina = Republik Rakyat Cina
SARS	- Severe Acute Respiratory Syndrome = Sindrom pernafasan akut parah
US	- United States = Amerika Serikat
WTO	- World Trade Organization = Organisasi Perdagangan Dunia

Daftar Isi

Prakata	iii
Ucapan terima kasih	vi
Singkatan dan akronim	viii
1. Kata Pengantar	3
2. Regionalisme Asia: konteks dan jangkauan	7
Logika aksi kolektif regional	8
Titik yang menentukan: krisis keuangan 1997–1998	9
Mendalamnya saling ketergantungan ekonomi	11
Asia tahun 2020	13
3. Integrasi produksi	16
Peningkatan hubungan regional dan global	17
Jaringan produksi dan perdagangan Asian	18
Kebijakan dalam lingkungan global yang pelik	21
Strategi regional dan global yang saling melengkapi	23
4. Integrasi pasar keuangan	25
Pencapaian semenjak krisis	26
Integrasi keuangan regional	27
Menuju pasar keuangan yang efisien dan terpadu	30
5. Mengelola saling ketergantungan ekonomi makro	33
Tumbuhnya saling ketergantungan	34
Kurangnya konvergensi kebijakan	35
Penyesuaian berikutnya	37
Mekanisme bagi kerja sama ekonomi makro	39
6. Membuat pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan	42
Siapa yang tertinggal?	43
Memerangi kemiskinan dan eksklusi	45
Migrasi tenaga kerja	48
Kesehatan dan keselamatan: barang publik yang kritis	49
Perlindungan lingkungan	49
Agenda sosial dan lingkungan	50
7. Menciptakan arsitektur untuk kerja sama	52
Regionalisme dengan karakteristik Asia	52
Arsitektur kerja sama	53
Kepemimpinan	56
Kemitraan untuk kemakmuran bersama	57
Daftar Pustaka	62

Tabel

Tabel 1.	Negara Asia: indikator dasar 2007	4
Tabel 2.	Proyeksi populasi dan PDB untuk tahun 2020	14
Tabel 3.	Kesepakatan perdagangan bebas Asia	22
Tabel 4.	Mendalamnya integrasi keuangan: investasi portfolio	29
Tabel 5.	Menurunnya varian pergerakan nilai tukar riil	36
Tabel 6.	Hasil dari perang melawan kemiskinan	43
Tabel 7.	Populasi yang menua	46
Tabel 8.	Forum kerja sama ekonomi utama di Asia dan Pasifik	58

Diagram

Diagram 1.	Peningkatan perdagangan intraregional	11
Diagram 2.	Berlanjutnya integrasi: indikator kawasan, sebelum dan sesudah krisis	12
Diagram 3.	Meningkatnya hubungan perdagangan	18
Diagram 4.	Jejaringan produksi: asal suku cadang dan komponen sebuah penggerak cakram keras (hard disk drive)	20
Diagram 5.	Perkembangan pendalaman keuangan, 1996 dan 2006	27
Diagram 6.	Konvergensi imbal hasil obligasi	28
Diagram 7.	Peningkatan cadangan devisa	37
Diagram 8.	Penurunan investasi dan peningkatan surplus neraca transaksi berjalan	38
Diagram 9.	Meningkatnya ketimpangan	44
Diagram 10.	Arsitektur ekonomi: Forum regional dan transregional	54

1. Kata Pengantar



Pusat gravitasi ekonomi global tengah berpindah ke Asia. Produk Domestik Bruto (PDB) Asia sudah hampir sebesar PDB Eropa dan Amerika Utara, dan pengaruhnya ke dunia terus meningkat. Di banyak negara Asia, siklus kemiskinan telah putus; di negara Asia lain, tujuan historis ini sudah nampak. Keberhasilan Asia yang luar biasa telah membawa tantangan baru: sementara pertumbuhan ekonomi yang pesat tetap menjadi prioritas, warga menuntut agar ini juga berkelanjutan dan lebih inklusif. Dan Asia kini sungguh penting bagi ekonomi dunia sehingga ia juga harus memainkan peran yang lebih besar dalam kepemimpinan ekonomi global. Kerja sama ekonomi regional, yang merupakan dimensi yang relatif baru dalam pembangunan Asia, akan menjadi penting bagi penanganan semua tantangan ini.

Intisari ini melaporkan temuan-temuan penting dari *Emerging Asian Regionalism*, sebuah kajian mendalam mengenai meningkatnya integrasi Asia dan implikasi-implikasinya bagi kerja sama ekonomi regional. Dukungan analitis dan empiris disampaikan dalam kajian utama dan makalah-makalah latar belakang yang disiapkan. Kajian ini berfokus pada 16 negara Asia yang telah membuat kemajuan penting dalam menghubungkan perekonomiannya (Tabel 1)¹. Ke-16 negara ini terdiri dari 87% dari jumlah penduduk Asia dan 96% dari output mereka, sehingga dalam studi ini sering dirujuk sebagai “Asia” saja. Dalam beberapa hal, negara-negara itu telah berhubungan dengan

¹ Kelompok ini dikuasai oleh negara-negara Asia Timur karena mereka telah sekian lama mempunyai komitmen akan pembangunan yang berorientasi keluar dan interaksi regional yang ekstensif. Hubungan India dengan kelompok ini sekarang tumbuh pesat. Definisi kelompok seperti ini pada dasarnya bisa saja berubah karena, meski mengundang perdebatan, kelompok ini dapat mencakup negara lain yang mempunyai hubungan ekonomi dan kerja sama yang erat dengan kawasan ini. Karena dinamika ekonomi kawasan ini yang hakiki, bentuk integrasi Asia cair dan dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu.

Tabel 1. Negara Asia: indikator dasar 2007

Negara	Populasi (juta)	Produk Domestik Bruto		Tingkat Pertumbuhan rata-rata 1986-2006 (persen)		Per- dagangan /PDB (persen)
		(\$ milyar)	(per kapita)	(\$ milyar)	(per kapita)	
Brunei Darussalam	0.4	12	30,750	1.5	-1.1	90.4
Kamboja	14.2	8	579	8.5	6.2	120.5
Republik Rakyat Cina	1,321.5	3,241	2,452	9.7	8.6	66.0
Hongkong, Cina	6.9	207	29,846	5.3	4.2	346.9
India	1,138.0	1,166	1,025	6.3	4.4	32.5
Indonesia	225.4	433	1,922	5.2	3.7	50.0
Jepang	127.9	4,380	34,246	2.2	1.9	28.2
Republik Korea	48.5	970	20,246	6.5	5.7	71.5
Republik Demokrasi Rakyat Laos	5.8	4	696	6.0	3.6	60.8
Malaysia	27.2	187	6,868	6.4	3.8	195.7
Myanmar	57.0	11	193	5.2	3.6	56.9
Filipina	88.7	145	1,634	4.1	1.8	84.7
Singapura	4.6	161	35,076	7.0	4.5	386.2
Taipei, Cina	23.0	383	16,680	5.6	4.7	130.3
Thailand	65.7	246	3,737	6.1	4.8	125.7
Vietnam	86.4	71	824	7.0	5.2	138.0
Asia	3,241.4	11,626	3,587	4.1	2.6	62.5
Total Asia	3,714.0	12,081	3,253	4.0	2.5	62.9
Uni Eropa	461.3	16,586	35,958	2.4	2.0	64.3
Amerika Serikat	301.1	13,841	45,963	3.1	2.0	22.4
Dunia	6,615.0	50,609	7,651	3.8	1.7	50.5

ADB = Asian Development Bank , PDB = Produk Domestik Bruto.

Catatan:

Data PDB untuk Brunei Darussalam tahun 2006 dan 2007 adalah perkiraan staf ADB berdasarkan sumber-sumber nasional.

Data PDB untuk Myanmar tahun 2005, 2006, dan 2007 adalah perkiraan staf ADB berdasarkan *Economist Intelligence Unit 2008*.

Data PDB untuk Taipei, Cina bersumber dari *Directorate General of Budget, Account and Statistics, Executive Yuan*. (<http://eng.stat.gov.tw>). Diakses Maret 2008.

Seri PDB untuk Kamboja dimulai tahun 1994.

PDB Dunia tahun 2007 merupakan estimasi staf ADB berdasarkan IMF 2008.

Pangsa Perdagangan/PDB mengacu pada nilai tahun 2006.

Tingkat pertumbuhan PDB dihitung berdasarkan harga konstan dollar AS tahun 2000.

Total Asia mencakup negara-negara Asia dalam tabel ditambah seluruh negara berkembang anggota ADB yang datanya tersedia.

Negara-negara ini adalah Afghanistan; Bangladesh; Bhutan; kepulauan Fiji; Georgia; Kiribati; Republik Kyrgyz; Kepulauan Marshall; Negara Federasi

Mikronesia; Mongolia; Nepal; Pakistan; Papua Nugini; Samoa; Kepulauan Solomon; Sri Lanka; Tajikistan; Tonga; Uzbekistan; dan Vanuatu.

Sumber: Data dari situs ADB 2007b. Tersedia: <http://www.adb.org>. Diakses: Maret 2008; dan World Bank 2007. Tersedia: <http://www.worldbank.org>. Diakses: Maret 2008.

erat seperti negara-negara dari pasar tunggal Eropa. Tetapi mereka juga sungguh berbeda: ada yang merupakan bagian dari negara-negara terkaya di dunia tapi ada juga yang termiskin, negara benua yang luas dan negara kota yang kecil, serta negara-negara yang selalu merdeka dan negara yang pernah menjadi koloni. Kekuatan Asia jelas berasal dari keterbukaan, keragaman, dan dinamika negara-negara yang saling berhubungan ini.

Negara-negara Asia pada prinsipnya dihubungkan melalui pasar—melalui perdagangan, arus keuangan, investasi langsung, dan bentuk-bentuk lain dari pertukaran ekonomi dan sosial.

Tetapi kemana pasar mengarah, pemerintah mengikuti. Para pemimpin Asia telah memiliki komitmen untuk bekerja sama lebih erat dan telah mengambil langkah konkret di beberapa tempat. Krisis keuangan 1997/1998², khususnya, merupakan katalis yang penting bagi kebangkitan regionalisme Asia dan mendorong munculnya inisiatif dan insitusi baru. Regionalisme Asia tidak bermaksud meniru Uni Eropa (EU), tetapi lebih berfokus untuk menemukan bentuk kerja sama baru yang fleksibel dan mencerminkan keragaman dan pragmatisme kawasan itu. Regionalisme Asia yang dibangun berdasarkan pencapaian luar biasa kawasan itu bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan berat yang masih menghadang.

Taruhannya tak bisa lebih tinggi. Regionalisme Asia yang dinamis dan berorientasi ke luar dapat membawa manfaat besar bagi Asia dan dunia. Perekonomian Asia yang tidak stabil dan kurang kompak dapat membawa dampak negatif secara regional dan global, sedangkan ekonomi Asia yang bersemangat dan terpadu dapat meningkatkan produktivitas dan persaingan, meningkatkan standar hidup di Asia dan di seluruh dunia. Asia yang kohesif dan produktif akan membantu menstabilkan dan memperkuat ekonomi dunia, dan dengan demikian membuat siapa saja tertarik. Pendek kata, kebangkitan regionalisme Asia dapat mengembangkan kemitraan yang meningkatkan kemakmuran regional dan global.

Pada saat kajian ini ditulis, reaksi terhadap krisis *subprime mortgage* (hipotek yang diberikan pada orang yang sebetulnya tidak memenuhi syarat) di Amerika Serikat masih berlanjut dalam sistem keuangan global. Perihal perlambatan ekonomi global yang merebak ini masih belum jelas. Yang jelas adalah bahwa Asia kini memiliki instrumen yang lebih beragam untuk mengelola prospek

² Krisis ini bermula 2 Juli 1997. Lamanya bervariasi tergantung tempatnya, tetapi rata-rata 1-2 tahun

ekonominya dibandingkan sebelumnya. Asia perlu memantau perkembangan ekonomi dan keuangan dengan cermat, dan harus siap untuk mengadopsi kebijakan yang terkoordinasi untuk mendukung perkembangan kawasan yang terus tumbuh ini. Kondisi global yang tak menentu menambah pentingnya rekomendasi kajian ini untuk memperkuat kestabilan keuangan dan mekanismekerja sama ekonomi makro kawasan ini. Namun, fokus kajian ini adalah masa depan yang merentang dalam jangka menengah, ketimbang jangka pendek: langkah-langkah yang dapat diambil Asia secara kolektif hingga, katakanlah, 2020 untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang pesat, inklusif dan berkelanjutan.

Belajar dari pengalaman Asian Development Bank selama 42 tahun dalam membiayai, menganalisa dan memberi saran perkembangan ekonomi kawasan ini, kajian ini mengamati penggerak-penggerak integrasi, menjajaki strategi-strategi realistis guna membangun komunitas ekonomi Asia yang terbuka, dinamis dan berusaha memberikan wawasan pada isu-isu besar yang akan membentuk

2. Regionalisme Asia: konteks dan jangkauan

ekonomi Asia di masa depan.

Hingga belakangan ini, pembangunan Asia memperlihatkan hubungan yang seiring—terkadang bersaing—dengan pasar di luar kawasan itu, dan tidak menghasilkan hubungan ekonomi yang kuat dalam Asia sendiri. Hal ini telah berubah—sementara kebijakan ekonomi kawasan ini sebagian besar tetap tidak diskriminatif dan berorientasi ke luar, negara-negara Asia telah tumbuh menjadi sedemikian besar dan makmurnya hingga menjadi sangat penting bagi satu sama lain. Transaksi perdagangan dan keuangannya lebih mendalam, tautan ekonominya lebih kuat, rakyatnya memiliki kontak lebih banyak satu sama lain, dan pemerintahnya bereksperimen dengan bentuk-bentuk kerja sama yang baru. Pendek kata, Asia tengah berintegrasi. Tetapi apakah integrasi akan mengarah kepada regionalisme?

Kajian ini menemukan bahwa:

- krisis keuangan 1997/98 menegaskan saling ketergantungan dan kepentingan bersama Asia, serta memberi dorongan besar pada kebangkitan regionalisme Asia;
- negara-negara Asia kian saling berhubungan dengan luas melalui perdagangan, keuangan, keterkaitan ekonomi makro, dan hubungan ekonomi penting lainnya;
- pertumbuhan Asia yang terus berjalan akan memperkuat integrasi, tetapi juga memerlukan solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan sosial dan ekonomi; dan
- kerja sama resmi akan perlu diperkuat, berdasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi yang tepat.

Langkah dari saling ketergantungan menuju regionalisme—dari integrasi yang diarahkan pasar menjadi integrasi yang didorong oleh kebijakan—tidaklah otomatis terjadi atau muncul dengan sendirinya. Dengan akses yang cukup ke pasar global, negara-negara Asia telah membuat kemajuan yang luar biasa secara sendiri-sendiri. Mereka juga telah mengembangkan hubungan regional yang kuat dengan

kesepakatan perjanjian formal yang jumlahnya relatif tak banyak. Tapi dengan adanya kesempatan-kesempatan usaha baru yang dihasilkan, integrasi regional ini juga menciptakan tuntutan baru bagi kerja sama antar pemerintah dan bagi pengembangan institusi.

Logika aksi kolektif regional

Regionalisme ekonomi mempunyai sejarah yang rumit dan cukup sulit. Pada tahun 1930-an, mundurnya perdagangan internasional mengarah pada munculnya blok-blok perdagangan khusus, yang kemudian makin merusak sistem perdagangan global dan mempercepat spiral aktivitas ekonomi yang menurun. Pengalaman ini memenuhi benak para arsitek sistem ekonomi global setelah terjadinya perang dan mereka mengadopsi prinsip non-diskriminasi sebagai pilar utama dari Persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan (GATT), cikal bakal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Terkait hal ini, regionalisme Asia harus konsisten dengan prinsip WTO: “benteng Asia” sama tak diminatinya seperti benteng Eropa atau benteng Amerika Utara. Tapi regionalisme dengan orientasi ke luar dan terbuka yang tengah bangkit di Asia saat ini tak perlu menjadi ancaman semacam itu. Banyak bukti seperti yang termuat dalam laporan ini menunjukkan bahwa Asia memiliki—dan akan terus memiliki—kepentingan mendasar dalam integrasi baik regional maupun global.

Aksi kolektif muncul dari kegagalan pasar yang akan mengurangi kesejahteraan ekonomi karena tak adanya kerja sama resmi. Perihal aksi kolektif regional ini masih lebih spesifik: aksi ini berkenaan dengan masalah-masalah yang memang bersifat regional atau yang, karena alasan lain, tak dapat diselesaikan di tingkat global atau nasional. Teori ekonomi berargumentasi mengenai perlunya aksi semacam itu karena adanya kondisi eksternalitas regional serta dampaknya, dan karena adanya kebutuhan untuk koordinasi kebijakan untuk menghasilkan barang-barang publik bersama. Sesuai dengan persyaratan ini, prakarsa regional Asia harus berfokus pada prioritas penting berikut ini:

- **menyediakan barang publik regional yang baru**, seperti mekanisme untuk mengatasi epidemi; sumber daya untuk menangani krisis keuangan; dan peraturan yang memungkinkan negara-negara untuk memadukan pasar-pasar keuangan, barang dan jasa;.
- **mengelola dampak di negara-negara** akibat dari hubungan makro-ekonomi yang lebih erat, arus modal dan aliran tenaga kerja yang lebih deras, serta kerusakan lingkungan;
- **menggunakan pengaruh Asia dalam forum ekonomi global** untuk membantu memelihara pasar global yang terbuka dan

kompetitif;

- **melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi** melebihi tingkat yang dapat dicapai melalui negosiasi global; dan
- **memberi nilai tambah dalam pembuatan keputusan nasional**, terutama dengan berbagi “praktek terbaik” dan menggaris bawahi prioritas yang mungkin ditentang oleh kepentingan tertentu domestik—seperti tindakan untuk meningkatkan kompetisi dan pengawasan peraturan, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta mengendalikan eksternalitas lingkungan hidup.

Dengan kata lain, kajian ini berpendapat bahwa kerja sama regional bukan merupakan tujuan atas kepentingannya sendiri, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih fundamental. Regionalisme bisa merupakan alat yang kuat dan bahkan penting untuk mengatasi segala konsekuensi saling ketergantungan dalam perdagangan dan investasi, keuangan, jalinan ekonomi makro, dan isu-isu sosial dan lingkungan. Hubungan Asia dalam semua bidang tersebut kian mendalam, dan institusi-institusi baru tengah muncul atau akan diperlukan untuk mengelola usaha kerja samanya.

Titik yang menentukan: krisis keuangan 1997/98

Kerja sama ekonomi Asia telah dibicarakan selama beberapa waktu—misalnya, tahun 1990, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammed mengusulkan pembentukan “Kelompok Ekonomi Asia Timur” tetapi tidak mendapat perhatian hingga terjadinya krisis keuangan 1997/1998 (untuk singkatnya, selanjutnya disebut ‘krisis’ saja). Krisis ini adalah titik yang menentukan: membuat kawasan ini memfokuskan dengan tajam perhatiannya kepada saling ketergantungan dan kepentingan bersama. Krisis ini juga mengungkapkan kelemahan dalam arsitektur keuangan global dan mendorong terjadinya prakarsa regional baru.

Krisis mulai terjadi 2 Juli 2007, ketika Thailand melepas pertahanannya yang singkat tetapi mahal atas baht terhadap serangan spekulasi. Serangan itu segera menyebar ke Indonesia, Malaysia dan Filipina. Kemudian menyebar ke Hongkong (Cina); Republik Korea; dan Taipei (Cina).

Meskipun Republik Rakyat Cina (RRC) and Hongkong (Cina), juga mengalami tekanan, mereka tak membiarkan mata uang mereka mengambang atau mengalami devaluasi. Krisis itu berlangsung singkat: sebagian besar mata uang terpuruk menjelang Januari 1998,

dan hampir semua negara Asia Timur mulai tumbuh lagi menjelang 1999. Tetapi krisis ini juga parah: di banyak negara, krisis ini juga melibatkan krisis perbankan yang serius, runtuhnya pasar kredit, dan resesi yang dalam. Bekas luka masih ada: tingkat kemiskinan meningkat pesat di negara-negara yang terkena dampaknya, dan, di sebagian besar negara, investasi dan pertumbuhan belum pulih seperti pada tingkat sebelum krisis terjadi.

Satu dekade kemudian, perdebatan berlanjut mengenai apakah krisis itu dipicu oleh asas-asas makro- atau mikro-ekonomi, atau hanya karena terlalu banyak investor yang “berbondong-bondong ke luar” (Radelet et al.1998). Ketiba-tibaannya, penyebaran geografis yang cepat, dan kesingkatannya menunjukkan bahwa kepanikan keuangan merupakan sebab yang penting—mungkin dominan. Tetapi seperti halnya kebanyakan fenomena ekonomi yang kompleks, krisis bisa disebabkan oleh banyak hal (Bank Dunia 1998). Kebijakan ekonomi makro yang lebih kuat dan sistem keuangan di negara-negara yang terkena dampak mungkin dapat mencegahnya; tindakan yang lebih pasti dan tepat oleh masyarakat keuangan internasional dapat mengurangi kerugiannya (Ito 2007); dan, seandainya ketika itu terdapat fasilitas pembiayaan regional Asia, mungkin ini dapat menyediakan dukungan yang lebih cepat dan terencana dengan lebih baik.

Tetapi krisis juga ada hikmahnya: sebagian besar negara Asia—termasuk yang tak terkena dampaknya secara langsung—menggariskan sebagai kesempatan untuk melakukan reformasi sistematis. Di dalam negeri, mereka melakukan restrukturisasi dan memperkuat sistem keuangan mereka; di tingkat regional, mereka membentuk mekanisme bagi kerja sama dan pembiayaan darurat. Pelajaran dari krisis itu dikupas dalam kajian utama; ada dua kesimpulan. Pertama, pertumbuhan yang pesat menciptakan ketegangan struktural, seperti pembangunan sektor keuangan Asia yang tertinggal, yang ditutup dengan topeng pertumbuhan yang kuat. Pembangunan ekonomi memerlukan pembangunan institusi yang tepat dan pembenahan tata kelola yang baik yang dilakukan secara paralel. Kedua, negara-negara Asia memiliki hubungan yang kian mendalam, dampak yang lebih berarti, dan (dengan demikian) taruhan yang lebih besar dalam stabilitas satu sama lain daripada yang dipahami sebelumnya. Asia memerlukan mekanisme kerja sama untuk meminimalkan resiko krisis dan untuk mengendalikan dan mengelola resiko yang muncul. Kedua kesimpulan itu menegaskan pentingnya peningkatan kerja sama regional.

Mendalamnya saling ketergantungan ekonomi

Krisis menyoroti hubungan ketergantungan di sektor keuangan, tetapi saling ketergantungan regional banyak dipahami sebagai proses yang kompleks, multidimensional yang meliputi beberapa ranah kegiatan ekonomi, kontak sosial dan rangkaian kerja sama resmi. Ukuran yang paling umum dari integrasi regional—pangsa perdagangan total yang dilakukan di dalam kawasan sendiri—telah meningkat di Asia dari sekitar seperlima setelah terjadinya Perang Dunia II menjadi sepertiga atau sekitarnya itu tahun 1980-an, dan menjadi lebih dari setengahnya di tahun-tahun belakangan ini. Asia kini mengalami ketergantungan dalam perdagangan yang sama besarnya seperti Uni Eropa (UE) dan Amerika Utara (Diagram 1). Memang, Asia kini lebih

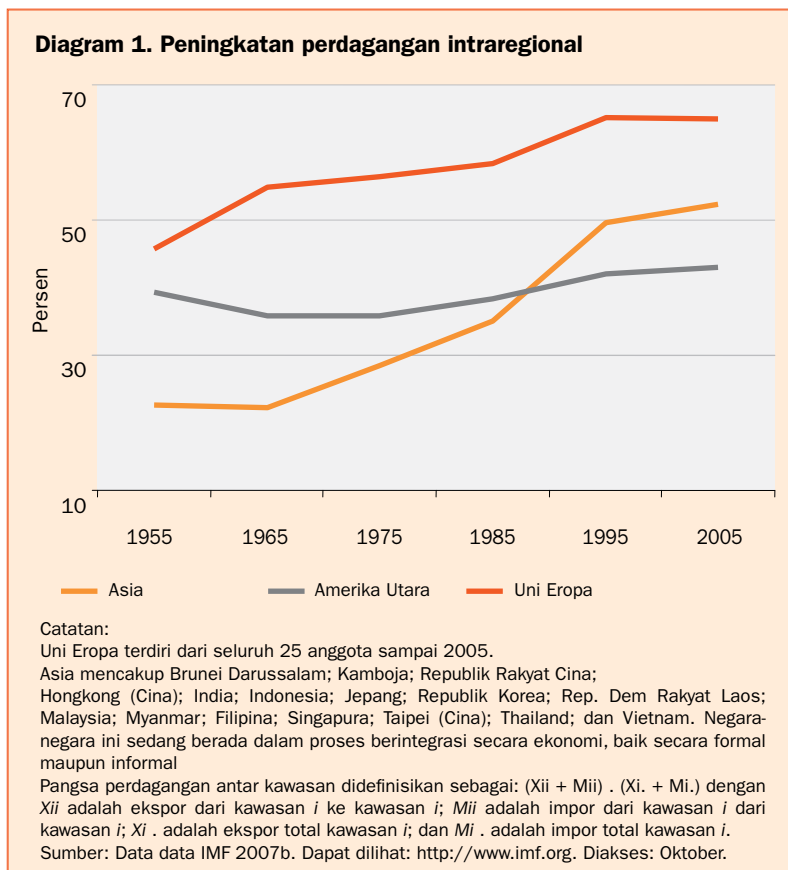
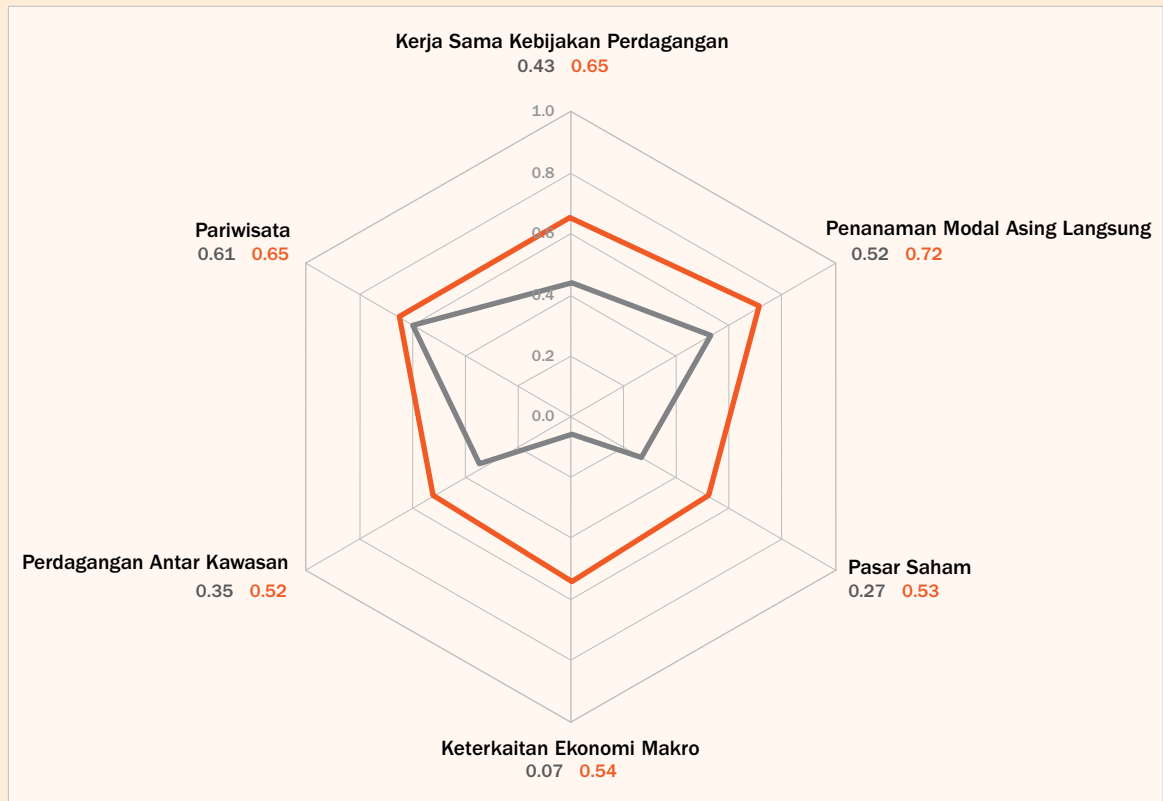


Diagram 2. Berlanjutnya integrasi: indikator-indikator kawasan, sebelum dan sesudah krisis



— Sebelum Krisis — Sesudah Krisis

Catatan:

Data dihitung untuk 16 perekonomian Asia, kecuali jika ada catatan di bawah ini.

Kerja Sama Kebijakan Perdagangan: Intensitas kesepakatan perdagangan bebas antar perekonomian Asia (pangsa hubungan perdagangan berpasangan/*pair-wise* yang berada dalam FTA, dengan bobot 1.0 untuk kesepakatan yang telah ditandatangani, 0.5 untuk kesepakatan yang masih dalam perundingan, 0.25 untuk kesepakatan yang masih dikaji)—sebelum krisis, sampai 1997; sesudah krisis: 1998–2007

Penanaman Modal Asing: Pangsa PMA antar kawasan Asia—sebelum krisis, 1982–1996; sesudah krisis, 1999–2002.

Pasar Saham: Korelasi antara perubahan harga saham kuartalan (*detrended*), dengan rata-rata sederhana untuk perekonomian Asia—sebelum krisis, 1990Q2–1996Q4; sesudah krisis, 2000Q1–2007Q2. Data tidak tersedia untuk India dan Vietnam.

Keterkaitan Ekonomi Makro: Korelasi antara pertumbuhan PDB triwulanan (*detrended*), dengan rata-rata sederhana untuk perekonomian Asia—sebelum krisis, 1988–1996; sesudah krisis, 1999–2007. Data tidak tersedia untuk India dan Vietnam.

Perdagangan Antar Kawasan: Pangsa perdagangan antar kawasan—sebelum krisis, rata-rata 1980–1996; sesudah krisis, rata-rata 2000–2006.

Pariwisata: Pangsa arus wisatawan masuk dan keluar antar kawasan —sebelum krisis, rata-rata 1994–1995; sesudah krisis, rata-rata 2004–2005.

Sumber data:

Kerja Sama Kebijakan Perdagangan: ARIC 2007.

Penanaman Modal Asing Langsung: UNCTAD 2007.

Pasar Saham: perhitungan staf ADB berdasarkan data Bloomberg.

Keterkaitan Ekonomi Makro: Oxford Economics 2008, dan Bureau of Economic Analysis, United States.

Perdagangan Antar Kawasan: IMF 2007b.

Pariwisata: United Nations World Tourism Organization.

banyak melakukan perdagangan dengan dirinya sendiri ketimbang yang dilakukan UE atau Amerika Utara pada awal usaha integrasi mereka.

Ukuran integrasi ekonomi yang lebih luas harus menggabungkan jalur integrasi yang lain, seperti investasi langsung, hubungan keuangan dan ekonomi makro, serta kontak pribadi. Hingga saat ini, data enam indikator integrasi ekonomi Asia telah dikumpulkan bagi ke-16 negara Asia yang sedang dalam proses berintegrasi ekonominya sebelum dan sesudah krisis 1997/1998. Rata-rata regional tampak pada Diagram 2. Ini perlu dibaca dengan hati-hati—beberapa indikator hanyalah mewakili hubungan ekonomi, dan indikator lain mengukur tren dan korelasi, yang tak selalu mencerminkan hubungan sebab akibat—tetapi adalah luar biasa bahwa enam indikator ini telah meningkat di tahun-tahun belakangan ini.

Integrasi regional bukan merupakan hasil pembangunan ekonomi yang tak dapat dihindarkan. Sebagian besar negara yang berkembang pesat—terutama negara yang besar atau yang mempunyai spesialisasi tinggi—memerlukan, dan biasanya mengembangkan, hubungan global yang kuat.

Tetapi sistem produksi berbasis jaringan yang muncul dalam tahun-tahun belakangan ini, juga investasi dan aliran tenaga kerja yang berhubungan dengannya, telah meningkatkan secara relatif arti pentingnya hubungan regional di Asia dan tempat lain. Jadi sementara negara-negara besar seperti RRC, Jepang dan Republik Korea tetap berhubungan erat dengan ekonomi global, mereka juga secara intensif meningkatkan hubungan regional. Sedikit banyak, mereka dan negara-negara maju lainnya bertindak sebagai penyalur ke pasar global. India berada pada tahap awal integrasi tetapi koneksi regionalnya juga tumbuh pesat. Memang, indeks saling ketergantungan regional secara keseluruhan (gabungan dari enam indikator) telah meningkat di semua negara Asia sejak krisis.

Asia di tahun 2020

Prediksi selalu berbahaya, tetapi ada alasan bagus untuk mengharapkan Asia mempunyai masa depan ekonomi yang cerah.³

³ Proyeksi jangka panjang ini dibuat oleh staf Asian Development Bank tahun 2006 sebagai latar belakang untuk analisa strategis. Proyeksi ini telah disesuaikan dengan mempertimbangkan perkiraan paritas daya beli yang baru (ADB 2007b). Tingkat pertumbuhan yang pokok ada pada rentangan perkiraan yang luas yang baru-baru ini diterbitkan oleh organisasi riset swasta dan umum..

Tabel 2. Proyeksi Populasi dan PDB untuk tahun 2020

Negara	Populasi		PDB Harga Berlaku			PDB berdasarkan PPP		PDB per kapita	
	(juta)		(\$ milyar)		Tingkat Pertumbuhan Rata-rata	(\$ milyar)		(harga berlaku)	
	2005	2020	2005	2020	2005–2020	2005	2020	2005	2020
Brunei Darussalam	0.4	0.5	10	20	4.7	18	37	25,754	40,910
Kamboja	13.8	18.6	6	15	6.3	20	48	454	806
Republik Rakyat Cina	1,303.7	1,422.8	2,244	5,877	6.6	5,333	13,970	1,721	4,131
Hongkong, Cina	6.8	7.1	178	353	4.7	243	483	26,094	49,718
India	1,101.3	1,295.7	779	1,748	5.6	2,341	5,255	707	1,349
Indonesia	218.9	259.5	287	611	5.2	708	1,506	1,311	2,355
Jepang	127.8	123.3	4,549	5,806	1.7	3,870	4,939	35,604	47,088
Republik Korea	48.1	50.5	791	1,580	4.7	1,027	2,052	16,441	31,287
Laos	5.7	7.2	3	5	3.7	10	18	508	694
Malaysia	26.1	31.1	137	313	5.7	300	682	5,250	10,064
Filipina	85.3	103.3	99	166	3.6	250	421	1,158	1,607
Singapura	4.3	4.9	117	240	4.6	180	371	26,879	48,980
Taipei, Cina	22.7	24.4	355	641	4.0	590	1,067	15,674	26,270
Thailand	64.8	69.5	176	347	4.6	445	877	2,721	4,993
Vietnam	83.1	97.5	53	117	5.5	178	394	637	1,200
Asia	3,112.7	3,515.9	9,783	17,839	4.1	15,514	32,120	3,143	5,074
Uni Eropa	450.6	472.1	13,568	19,176	2.3	12,743	18,011	30,111	40,619
Amerika Serikat	296.4	331.2	12,376	19,904	3.2	12,376	19,904	41,754	60,097
Dunia	6,128.1	7,462.1	44,309	75,001	3.6	54,976	93,057	7,230	10,051

PDB = produk domestik bruto, PPP = paritas daya beli.

Sumber: proyeksi staf Asian Development Bank berdasarkan data program perbandingan internasional. Data dari ADB 2007b. Dapat dilihat www.adb.org. Diakses: Maret 2008; dan World Bank 2008. Dapat dilihat di <http://www.worldbank.org>. Diakses: Maret.

Bahkan jika pertumbuhan di RRC dan India melambat pun, pangsa Asia dalam output dunia tampaknya bakal meningkat dari 28% tahun 2005 menjadi 35% tahun 2020 berdasarkan paritas daya beli (PPP) (Tabel 2). Menjelang masa itu, PDB Asia akan 50% lebih besar dari UE atau Amerika Utara. RRC akan banyak berperan untuk perolehan ini: pangsanya dalam output dunia diharapkan meningkat dari 10% menjadi 15%. Pendapatan per kapita rata-rata Asia akan meningkat

dari sekitar \$3.000 tahun 2005 menjadi sekitar \$5.000 (dalam dolar tahun 2005) tahun 2020, suatu tingkatan yang kurang-lebih setara dengan Malaysia saat ini. Pendapatan per kapita akan meningkat lebih dari dua kali lipat di beberapa negara, termasuk RRC. Pada harga pasar, kenaikan ini kurang dramatis tetapi tetap substansial. Yang lebih penting, proyeksi menunjukkan bahwa hubungan regional Asia tampaknya bakal meningkat lebih jauh: di sisi permintaan, kebutuhan pembelanjaan kawasan ini bakal tumbuh melebihi pertumbuhan di bagian lain di dunia; sedangkan di sisi penawaran, kemampuan produksinya kelihatannya akan terus berkembang dan beragam.

Jantung proyeksi ini adalah dinamika yang terus berlanjut dari RRC dan India, yang kalau digabung jumlah penduduknya dua per lima populasi dunia. Pertumbuhan ekonomi RRC rata-rata mencapai 10% per tahun dalam 20 tahun terakhir; India mencapai 6% dan telah melampaui 8% dalam beberapa tahun terakhir. Kedua raksasa ini memiliki pasar yang besar; biaya yang rendah, angkatan tenaga kerja yang relatif berpendidikan; dan mempunyai komitmen terhadap pembangunan berbasis pasar. Mereka cukup besar untuk memasuki berbagai macam industri dan membangun banyak kelompok produksi dan jaringan usaha yang canggih secara bersamaan. Sebagai akibatnya, mereka menjadi magnet yang kuat untuk investasi dan lokomotif yang efektif bagi negara-negara yang lain yang terhubung.

Bangkitnya RRC dan India menimbulkan pergeseran dalam perekonomian negara-negara di kawasan ini dan di dunia. Mereka adalah pesaing yang luar biasa dalam bidang keunggulan komparatifnya, dan mereka menawarkan pasar yang luas dan kesempatan investasi yang sungguh menarik. Negara-negara Asia lainnya telah banyak mendapatkan manfaat dari kebangkitan RRC dan India—meskipun persaingan dalam produk dan industri tertentu telah membawa korban. Dunia juga telah diuntungkan, tetapi ketegangan muncul dalam pasar ekspor Cina dan India. Pertumbuhan kedua negara yang terus meningkat itu akan membantu mendorong peningkatan produktivitas dan juga pertumbuhan ekonomi dunia, tetapi ini akan memerlukan penyesuaian besar—dan ini tampaknya akan menimbulkan kesempatan dan ketegangan yang terus berlanjut. Mengatasi ketegangan ini di Asia dan di dunia adalah tantangan utama darikerja sama regional Asia.

3. Integrasi produksi



Orientasi ke luar, liberalisasi perdagangan, dan reformasi yang terkait—di Asia dan secara global—telah membantu mendorong kebangkitan ekonomi Asia yang menakjubkan. Kekuatan-kekuatan ini telah mengarah pada perkembangan pesat perdagangan intraregional; secara luas Asia melakukan perdagangan dengan negara lain di kawasannya sendiri sama banyaknya dengan yang dilakukan oleh Eropa dan Amerika Utara dengan negara dalam kawasan mereka sendiri. Dan perdagangan belum berpindah dari mitra non-Asia ke Asia –justru pola pertumbuhan dan spesialisasi perdagangan Asia telah mengakibatkan pertumbuhan pesat khususnya dalam perdagangan intraregional. Dan karena hubungan global Asia tetap penting, kawasan ini perlu mengusahakan kesepakatan global dan juga hubungan regional yang lebih dalam.

Kajian ini mendapati bahwa

- Perdagangan dan investasi Asia telah menjadi semakin terintegrasi tetapi tetap berhubungan erat dengan pasar eksternal;
- hubungan regional ini banyak didorong oleh jaringan produksi dan *outsourcing* proses bisnis;
- kawasan ini telah meningkatkan usahanya untuk menyelesaikan kesepakatan perdagangan dan investasi bilateral dan subregional; dan
- Asia memiliki kepentingan yang besar untuk mempertahankan pasar terbuka, dengan pendekatan global dan regional yang saling melengkapi.

Integrasi regional sekarang merupakan hal yang amat penting sehubungan dengan keunggulan komparatif Asia dalam perdagangan dunia. Dengan menggalakkan integrasi lebih lanjut, inovasi, dan

kompetisi, kawasan ini dapat terus mengkonsolidasi kepemimpinannya dalam industri pabrikan global. Tetapi untuk memperoleh manfaat sepenuhnya dari keunggulan ini, Asia perlu memelihara aksesnya yang bagus terhadap pasar global. Untuk mencapai dua tujuan ini—integrasi regional dan akses global—Asia harus memainkan peran kunci dalam pembuatan kebijakan global, khususnya sebagai pendukung pasar global yang terbuka.

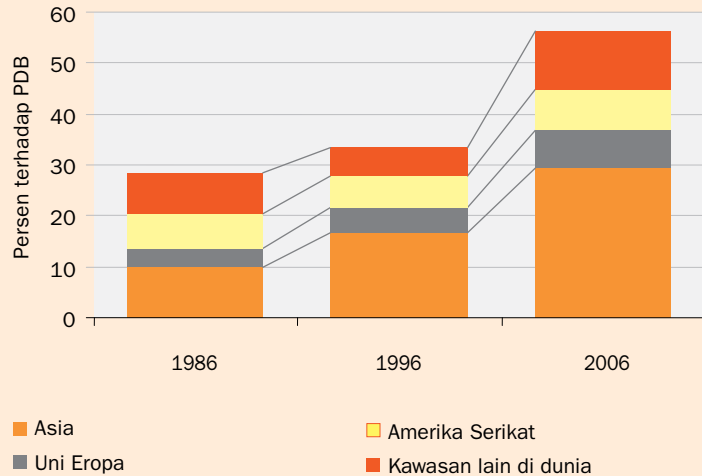
Peningkatan hubungan regional dan global

Hampir semua negara Asia telah menjadi semakin global—sebagian bahkan melakukannya dengan sangat dramatis. Total ekspor dan impor Vietnam membumbung tinggi dari 24% dari PDB tahun 1985 menjadi 142% tahun 2006; PDB dari RRC dan India masing-masing berlipat tiga pada periode yang sama, seiring dengan peningkatan keterbukaan perdagangan yang diasosiasikan dengan tingkat pertumbuhan. Kenaikan belakangan ini secara khusus telah memberi keuntungan pada perdagangan intraregional (Diagram 1). Tetapi perdagangan belum beralih dari bagian lain di dunia; sebaliknya, perdagangan dengan masing-masing kelompok dari empat kelompok utama mitra Asia (kawasan itu sendiri, UE, AS dan bagian lain di dunia) telah meningkat pada dua dekade terakhir—bukan hanya secara absolut, tapi juga relatif terhadap PDB Asia (Diagram 3). Misalnya, perdagangan Asia dengan UE telah meningkat lebih dari dua kali lipat (dihitung proporsional terhadap PDB), dari 2,6% tahun 1986 menjadi 6,0% tahun 2006. Peningkatan ini bahkan lebih besar lagi jika dihitung proporsional terhadap PDB EU.

Sementara perdagangan intraregional terus meningkat, perdagangan eksternal tetap vital bagi negara-negara Asia. Memang, kenaikan pangsa ekspor Asia ke pasar global mengecilkan pentingnya perdagangan eksternal Asia tersebut. Struktur jaringan produksi modern yang kompleks mengaburkan tujuan ekspor; suku cadang dan komponen yang diekspor dalam Asia seringkali digabungkan menjadi barang jadi yang dikapalkan ke Amerika Utara dan Eropa. Analisa terinci mengenai ketergantungan perdagangan Asia (dilaporkan dalam kajian utuh) mengungkapkan bahwa pangsa ekspor Asia meningkat tajam jika nilai suku cadang dan komponen yang berada dalam barang jadi yang diekspor ke pasar tersebut ikut diperhitungkan.

Diagram 3. Meningkatnya hubungan perdagangan

Perdagangan Asia sebagai pangsa terhadap PDB, berdasarkan tujuan



PDB = Produk Domestik Bruto.

Catatan:

Perdagangan adalah ekspor + impor.

Uni Eropa terdiri dari 25 negara hingga dengan tahun 2006.

Asia mencakup Brunei Darussalam; Kamboja; Republik Rakyat Cina; Hongkong (Cina); India; Indonesia; Jepang; Republik Korea; Rep. Demokrasi Rakyat Laos; Malaysia; Myanmar; Filipina; Singapura; Taipei (Cina); Thailand; dan Vietnam.

Sumber: Data IMF 2007b. Dapat dilihat: <http://www.imf.org>. Diakses: Oktober.

Jaringan produksi dan perdagangan Asia

Perdagangan Asia yang tumbuh pesat mencerminkan posisi dominan kawasan ini dalam industri pabrikan global. Hal ini merupakan hasil kombinasi upah rendah, tenaga kerja yang berpendidikan, teknologi canggih, pertumbuhan produktivitas yang tinggi, pasar yang luas, dan (di atas semuanya) kemampuan untuk menggabungkan semua keunggulan produksi yang beragam. Industri pabrikan—khususnya dalam industri otomotif dan elektronik—kini sering didasarkan pada pemecahan rantai produksi menjadi tahapan-tahapan lebih kecil, di mana setiap tahapan dihasilkan di lokasi yang biayanya yang paling

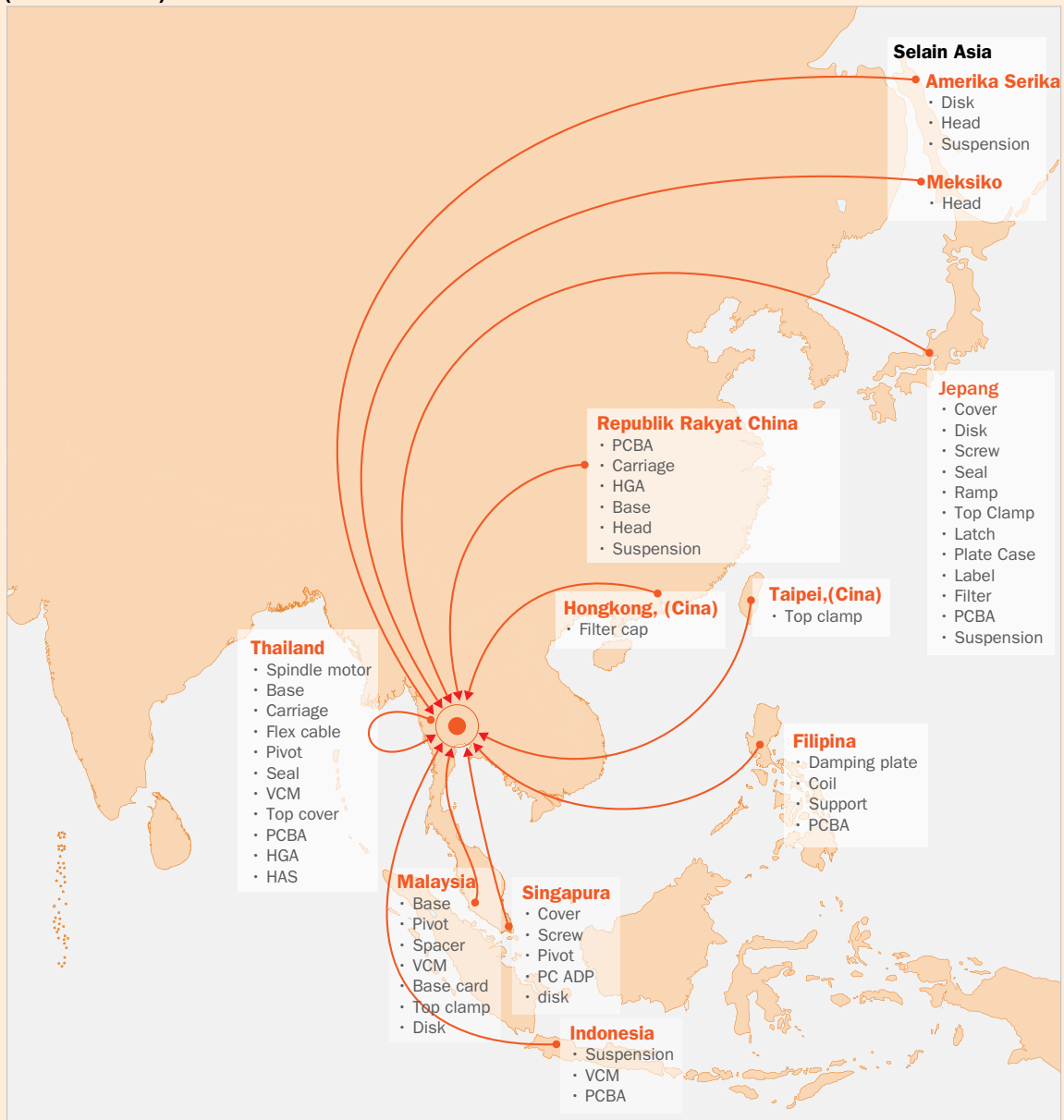
efisien. Perusahaan dapat mendirikan fasilitas produksi mereka di berbagai negara atau mereka dapat bergantung pada transaksi dengan perusahaan lain di luar negeri. Transaksi ini juga dapat mencakup *outsourcing* proses bisnis. Adanya jaringan produksi semacam itu—seringkali disebut “fragmentasi produksi”—relatif merupakan tren baru, didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi yang baru.⁴ Jaringan semacam itu telah berhasil khususnya di Asia karena begitu beragamnya tingkat perkembangan di kawasan ini, hubungan intraregional yang kuat dan tersedianya kapasitas bagi perubahan teknologi dan organisasi.

RRC semakin menjadi pusat bagi jaringan produksi seperti itu, tetapi semua negara turut ambil bagian. Pembuatan penggerak cakram (disk drive) di Thailand merupakan contoh yang sangat jelas: membentang di delapan negara Asia (dengan banyak bagian berasal dari tiap-tiap negara), dan Meksiko dan Amerika Serikat yang juga menjadi pemasok (Diagram 4). Jaringan produksi telah memainkan peran utama dalam ekspansi besar-besaran perdagangan intra-industri Asia, khususnya dalam suku cadang dan komponen mesin. Sementara pangsa dari suku cadang dan komponen dalam perdagangan industri pabrikan dunia tumbuh sebanyak 3 persen antara 1992 dan 2003 (dari 18% menjadi 21%), dan naik 8 persen di Asia (dari 19% menjadi 27%). RRC adalah pedagang suku cadang dan komponen terbesar di kawasan ini, tetapi lebih dari tiga perempat perdagangan melibatkan negara-negara Asia lainnya—termasuk Malaysia, Filipina, Singapura, dan Taipei (Cina)—empat negara dengan perdagangan suku cadang dan komponen yang termasuk tertinggi di dunia, dihitung secara proporsional terhadap PDB.

Tumbuhnya jaringan produksi meningkatkan urgensi atas perlunya langkah-langkah untuk mempermudah integrasi regional. Jaringan semacam itu memerlukan iklim bisnis yang menarik dan dapat diprediksi, dan juga membutuhkan infrastruktur angkutan dan komunikasi kelas dunia. Kebanyakan negara Asia cukup maju dalam memberikan iklim yang kondusif bagi usaha. Misalnya, sebagian besar negara Asia telah memangkas tarif dan hambatan impor lainnya, baik sendiri-sendiri atau melalui kesepakatan global. Dua negara,—Hongkong (Cina) dan Singapura—pada dasarnya menganut prinsip perdagangan bebas; tiga negara—Jepang, Republik Korea dan Taipei (Cina)—sangat terbuka kecuali dalam sektor pertanian. RRC memotong tarif dari 16% tahun 2001, sebelum ikut WTO, hingga kurang dari 10% tahun 2005. Tarif dalam Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) juga telah turun, dan kini rata-rata di bawah

⁴ Literatur teoritis dan empiris mengenai perdagangan akibat “produksi yang terfragmentasi” tumbuh pesat (Lihat kajian utama dan Ando dan Kimura [2005] serta Athurkorala dan Yamashita [2005]).

Diagram 4. Jejaringan Produksi: asal suku cadang dan komponen sebuah penggerak cakram keras (hard disk drive)



Catatan: Produksi *hard-disk drive* memerlukan berbagai suku cadang dan komponen. Contoh di atas menunjukkan pengadaan sebenarnya dari suku cadang dan komponen-komponen dari perusahaan perakitan *hard-disk drive* di Thailand. Sebagian besar bagian dan komponen itu berasal dari negara Asia lainnya. *Hard-disk drive* digunakan dalam sejumlah produk elektronik. Perusahaan perakitan *hard-disk drive* di Thailand ini mengekspor sejumlah besar produksinya ke perusahaan elektronik yang sebagian besar terletak di negara ekonomi Asia lainnya.
Sumber: Diambil dari Hiratsuka 2006.

10% pada semua sektor. Langkah-langkah komprehensif menyangkut pembatasan perdagangan (Feridhanusetyawan 2005) membuahkan hasil yang lebih perlahan, tetapi mengkonfirmasi tren liberal menyeluruh.

Meskipun demikian masih ada yang perlu diperbaiki di banyak negara. Perdagangan seringkali masih terhambat oleh restriksi tarif dan bukan tarif, standar serta peraturan domestik yang tidak cocok. Liberalisasi lebih lanjut merupakan hal yang vital, khususnya dalam pertanian. Liberalisasi dapat menjangkau lebih luas berbagai lapisan masyarakat yang menerima manfaat dari perdagangan regional, membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, baik dalam suatu negara atau di antara negara-negara. Dan menyebarkan praktek terbaik Asia sendiri dalam menjalankan usaha dapat membantu menjadikan lingkungan usaha secara keseluruhan di Asia menjadi yang paling kompetitif didunia. Meski banyak kebijakan yang perlu diadopsi secara nasional, karena integrasi Asia yang pesat, kawasan ini sebagai satu kesatuan kini merupakan pemangku kepentingan dalam lingkup kebijakan masing-masing negara.

Kebijakan dalam lingkungan global yang pelik

Sebagian besar negara Asia tampaknya siap untuk melakukan reformasi tambahan dan liberalisasi perdagangan –dengan mitra yang bersedia. Hingga awal 2008, negosiasi Agenda Pembangunan Doha WTO tetap menemui jalan buntu, dan pengaturan-pengaturan perdagangan regional dan bilateral yang baru atau lebih mendalam sekarang muncul di seluruh dunia. Sampai dibentuknya Kawasan Bebas Perdagangan ASEAN (AFTA) tahun 1992, Asia belum mengambil bagian dalam pengaturan perdagangan regional, tetapi sekarang kesepakatan perdagangan bilateral dan subregional telah ada di Asia juga (Tabel 3). Ini merupakan tantangan bagi pendekatan tradisional kawasan ini di mana kebijakan perdagangan lebih berdasarkan liberalisasi unilateral dan global.

Jumlah kesepakatan perdagangan bebas (FTA) Asia telah bertambah dengan cepat dalam tahun-tahun belakangan ini, dan jumlah kesepakatan yang tengah diajukan atau tengah dilakukan negosiasi mencapai hampir dua kali lipat dibandingkan yang telah selesai. FTA di kawasan ini adalah gabungan dari berbagai sumber—mayoritas terbesar dengan mitra di luar kawasan. Persetujuan yang melibatkan negara-negara maju seperti Jepang, dan AS sering kali

Tabel 3. Kesepakatan perdagangan bebas Asia

Badan Perunding	Status sampai Desember 2007					
	Selesai	Dalam Perundingan	Diusulkan	Total	Di Asia	Dengan Luar Asia
ASEAN	2	4	0	6	4	2
Brunei Darussalam	3	0	4	7	3	4
Kamboja	1	0	2	3	2	1
Republik Rakyat Cina	7	6	9	22	8	14
Hongkong, Cina	1	1	0	2	1	1
India	8	10	12	30	8	22
Indonesia	3	1	6	10	4	6
Jepang	8	7	4	19	12	7
Republik Korea	6	5	11	22	9	13
Rep. Dem. Rakyat Laos	3	0	2	5	3	2
Malaysia	4	5	4	13	5	8
Myanmar	1	1	2	4	2	2
Filipina	2	0	4	6	3	3
Singapura	11	10	5	26	6	20
Taipei, Cina	4	2	1	7	0	7
Thailand	6	6	6	18	7	11
Vietnam	1	1	2	4	3	1
Total^a	44	49	41	134	30	104

^a Jumlah ini menghindari penghitungan ganda dan tidak sama dengan penjumlahan seluruh kesepakatan menurut status.

ASEAN = Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara

Catatan atas status kesepakatan perdagangan bebas:

Selesai = Telah ditandatangani dan/atau sudah dilaksanakan.

Dalam perundingan = Masih dalam tahap negosiasi dengan atau tanpa kerangka kesepakatan yang sudah ditandatangani.

Diusulkan = Pihak-pihak yang terlibat sedang mempertimbangkan untuk membuat kesepakatan, membentuk kelompok kajian bersama atau gugus tugas bersama, dan/atau melakukan studi kelayakan untuk suatu kesepakatan.

Sumber: Data dari ARIC 2007.

memiliki struktur yang dalam dan formal, dan banyak di antaranya yang melampaui sektor-sektor cakupan WTO. FTA Singapura-AS, misalnya, meliputi isu-isu mulai dari hak kepemilikan intelektual dan investasi asing hingga pengadaan oleh pemerintah, perdagangan elektronik (*e-commerce*), hambatan teknis perdagangan, lingkungan, tenaga kerja, dan beberapa sektor jasa (Naya dan Plummer 2005). Pendek kata, inventaris kesepakatan perdagangan itu luas, bervariasi dan bertumbuh.

Strategi regional dan global yang saling melengkapi

Meskipun terdapat banyak kesepakatan FTA, kebijakan perdagangan Asia tetap konsisten dengan strategi kawasan yang global dan berorientasi ke luar. Sebagian besar alasan kebangkitan regionalisme Asia bersifat defensif—atau “untuk pemulihan pasar” (Menon 2007)—dan merupakan reaksi terhadap munculnya kesepakatan-kesepakatan regional yang baru atau lebih dalam di Eropa, Amerika Utara dan pasar penting lainnya. Kesepakatan di antara negara-negara Asia sering mencakup ketentuan di luar perdagangan, seperti perlakuan nasional terhadap investasi. Kesepakatan seperti ini bertujuan menghilangkan hambatan domestik terhadap transaksi dan untuk menciptakan pasar yang lebih besar serta membentuk platform produksi dengan skala keekonomian yang menandingi skala keekonomian RRC dan India. Kesepakatan semacam itu tampaknya bakal meningkatkan efisiensi pasar dan produktivitas investasi.

Tetapi meskipun kesepakatan-kesepakatan kawasan itu secara umum menghargai konteks internasional mereka, akan lebih baik kalau negara-negara di Asia membenahi bersama jaring kusut dari kesepakatan FTA bilateral dan subregional dan merumuskannya dalam kerangka kerja yang luas, komprehensif dan konsisten dengan WTO. Konsolidasi telah dibicarakan oleh ASEAN+3 dan Pertemuan Puncak Asian Timur (EAS, seringkali disebut ASEAN+6). Suatu “Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik” yang bahkan lebih luas juga telah diusulkan dalam Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Hasil simulasi model menunjukkan bahwa pengaturan yang lebih luas membawa keuntungan yang lebih besar untuk membantu mengurangi masalah terkait dengan tidak konsistensinya kesepakatan bilateral. Asia akan memperoleh keuntungan terbesar dari perdagangan bebas global, Asia akan memperoleh sekitar setengah keuntungan dari perdagangan bebas global tersebut dari kesepakatan ASEAN+3 ataupun EAS, serta jauh lebih sedikit dari kesepakatan bilateral yang tak terkoordinasi. Mengingat kesulitan dalam mencapai perdagangan bebas global, suatu kesepakatan FTA yang terkonsolidasi akan menghasilkan manfaat penting dan dapat juga memajukan integrasi global (Kawai dan Wignarajaya 2008).

Dengan demikian integrasi penuh pasar barang dan jasa kawasan ini menjadi tujuan utama kerja sama ekonomi Asia. Ini dapat dicapai dengan kebijakan-kebijakan yang melakukan hal sbb:

- **Mendukung sistem perdagangan global terbuka.** Keberhasilan Asia yang berlanjut tergantung pada akses ke pasar global, sehingga suatu sistem perdagangan dan investasi global yang berbasis peraturan tetap merupakan prioritas regional yang utama. Dengan bertindak bersama, Asia dapat membantu tercapainya kesepakatan putaran Doha dan memperkuat kerangka kerja WTO.
- **Mengusahakan kerja sama regional seluas dan sedalam mungkin.** Karena negosiasi global bergerak dengan lambat dan ada kesempatan bagi kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk menghasilkan kesepakatan yang lebih dalam, maka mengejar kesepakatan regional yang luas juga merupakan kepentingan Asia. Manfaat mengkonsolidasikan kesepakatan FTA bilateral dan subregional menjadi satu ketentuan yang mencakup seluruh kawasan itu akan menjadi teramat penting.
- **Mengembangkan panduan bagi praktek terbaik dalam kesepakatan perdagangan subregional.** Kesepakatan perdagangan yang dinegosiasikan secara independen seringkali melibatkan ketentuan aturan asal barang (rules of origin) yang tidak cocok dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak konsisten. Kesepakatan yang sempit dan sepihak mungkin juga bakal merugikan mitra regional dan global yang tidak diikutsertakan. Untuk memastikan bahwa kesepakatan perdagangan subregional mengakui kepentingan regional dan lebih mudah dikonsolidasikan, kesepakatan itu haruslah dipandu oleh prinsip-prinsip praktek terbaik yang diterima kawasan itu. Kesepakatan semacam itu harus memberikan prioritas pada sektor-sektor, seperti pertanian, yang memiliki dampak distribusi yang menguntungkan.
- **Meningkatkan hubungan regional.** Membangun perekonomian regional memerlukan infrastruktur kelas dunia—sistem transportasi, komunikasi, dan energi—untuk menghubungkan negara-negara di kawasan ini, dan khususnya untuk menghubungkan negara-negara dan subkawasan yang lebih miskin dengan pusat-pusat ekonomi kawasan itu.

4. Integrasi pasar keuangan

Sistem keuangan yang selama beberapa dekade terus didominasi oleh bank dan terlalu diatur telah membuat pasar keuangan Asia secara relatif terbelakang. Krisis juga membuat kawasan ini khawatir membuka pasar modalnya. Tetapi kini sementara Asia membuat kemajuan dalam memperkuat dan memadukan pasar keuangannya, hubungan dalam sektor keuangan kawasan itu tetap lebih lemah dibandingkan hubungan dagangnya. Dan hubungan sektor keuangan dalam kawasan ini sendiri pun lebih lemah dibandingkan hubungan sektor keuangan masing-masing negara dengan pasar modal global. Tantangannya adalah mempercepat suatu siklus yang bermanfaat dan penting—untuk menarik lebih banyak tabungan Asia yang substansial ke pasar regional sehingga, pada gilirannya, merangsang pembangunan infrastruktur hukum, ketentuan, teknis dan informasi yang canggih bagi sistem keuangan itu.

Kajian ini mendapati bahwa

- sistem keuangan Asia telah jauh membaik sejak krisis;
- hubungan sektor keuangan di kawasan ini kian mendalam, tetapi pasar modal Asia tetap lebih erat terhubung ke pasar global daripada satu sama lain; dan
- kerja sama keuangan regional dapat dengan dramatis memperkuat system keuangan nasional dan hubungan regionalnya.

Asia merupakan pusat keuangan kelas dunia. Dua negara—Hongkong (Cina) dan Singapura—masuk peringkat lima besar di dunia (City of London Corporation 2007). Tapi banyak negara di Asia yang tetap terseok-seok karena tekanan finansial. Mengatasi hal ini merupakan prioritas regional dan juga nasional. Jika Asia dapat menginvestasikan simpanannya yang besar itu ke dalam kawasan ini sendiri, manfaatnya akan besar. Misalnya, menginvestasikan simpanan Asia tersebut akan (1) mendorong pendirian kendaraan investasi yang canggih untuk mengembangkan opsi-opsi pembiayaan

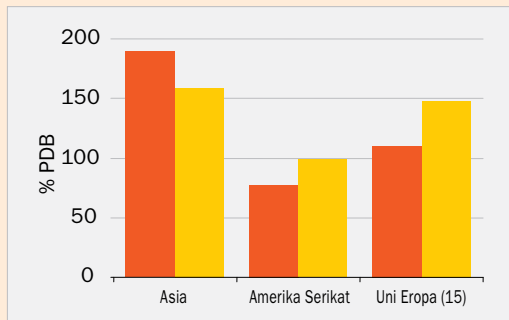
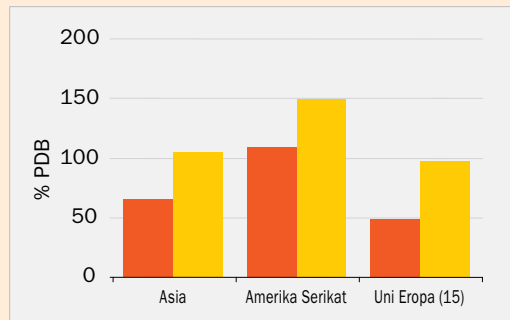
regional—baik untuk perusahaan kecil maupun proyek-proyek infrastruktur yang rumit; (2) mengembangkan intermediasi finansial yang inovatif yang dapat mengidentifikasi dan menciptakan proyek investasi yang dapat “di-bank-an”; (3) menghasilkan produk-produk keuangan yang memungkinkan konsumen dan investor untuk menggunakan penghasilan dan aset mereka dengan lebih produktif.

Pencapaian semenjak krisis

Pasar keuangan Asia menjadi semakin kuat dan aman sejak krisis: persaingan besar telah diperkenalkan; kepemilikan sektor swasta dan masuknya sektor asing telah digalakkan; dan tata kelola usaha, penyingkapan informasi dan peraturan kehati-hatian telah diperketat. Kapasitas lembaga keuangan untuk melakukan penilaian dan mengelola krisis telah ditingkatkan.

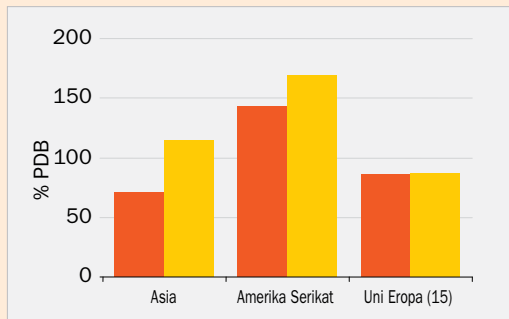
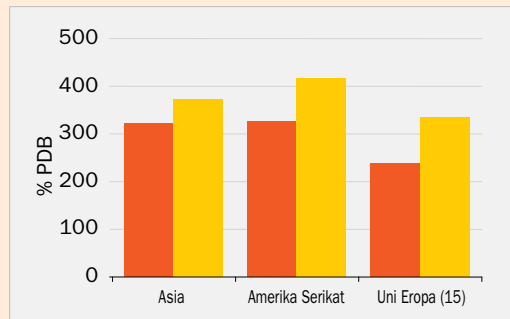
Pendalaman sektor keuangan telah terjadi dengan lebih cepat daripada di UE atau AS—meskipun dari dasar yang lebih rendah—dan dihitung berdasarkan proporsi terhadap PDB-nya, Asia sekarang memiliki pasar modal yang lebih besar daripada yang dimiliki UE (Diagram 5). Pasar modal, khususnya, telah tumbuh dengan sangat pesat baik dalam nilai absolut, sebagai pangsa dari total aset keuangan, dan relatif terhadap PDB.

Data lain juga menunjukkan adanya kemajuan dalam reformasi sistem keuangan Asia dan efisiensi pasar. Dalam perbankan, kredit macet telah turun drastis, dan rasio kecukupan modalnya kini melebihi tingkat Basel I di sebagian besar kawasan itu. Tetapi di banyak pasar, bank milik pemerintah masih dominan, dan memerlukan perombakan besar-besaran serta swastanisasi. Proses-proses yang berkaitan dengan peraturan telah diperkuat, tetapi masih perlu dibenahi, khususnya dalam persiapan untuk mengadopsi standar Basel II. Sistem yang efisien untuk mengelola perdagangan surat berharga, pembayaran dan penyelesaian transaksi, telah menjadi kian penting; perlu diperluas dan dihubungkan di seluruh pasar. Aturan efektif tentang surat berharga, pada gilirannya, dapat membantu membuat pasar lebih aman, lebih dalam dan lebih inovatif; pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal—baik primer maupun sekunder—khususnya merupakan prioritas penting. Untuk mendukung perkembangan ini, usaha untuk meningkatkan tata kelola usaha perlu dilanjutkan, antara lain melalui penyediaan informasi yang lebih baik bagi pemantauan terhadap pasar oleh swasta, termasuk oleh badan-badan penilaian internasional.

Diagram 5. Perkembangan pendalaman keuangan, 1996 dan 2006 (persentase dari PDB)**a. Klaim Bank****b. Pasar Saham**

1996 ■

2006 ■

c. Pasar Obligasi**d. Aset Total Sektor Keuangan**

PDB = Produk Domestik Bruto.

Asia = 11 negara yang data pasar keuangannya tersedia: Republik Rakyat Cina; Hongkong (Cina); India; Indonesia; Jepang; Republik Korea; Malaysia; Filipina; Singapura; Taipei (Cina); dan Thailand.

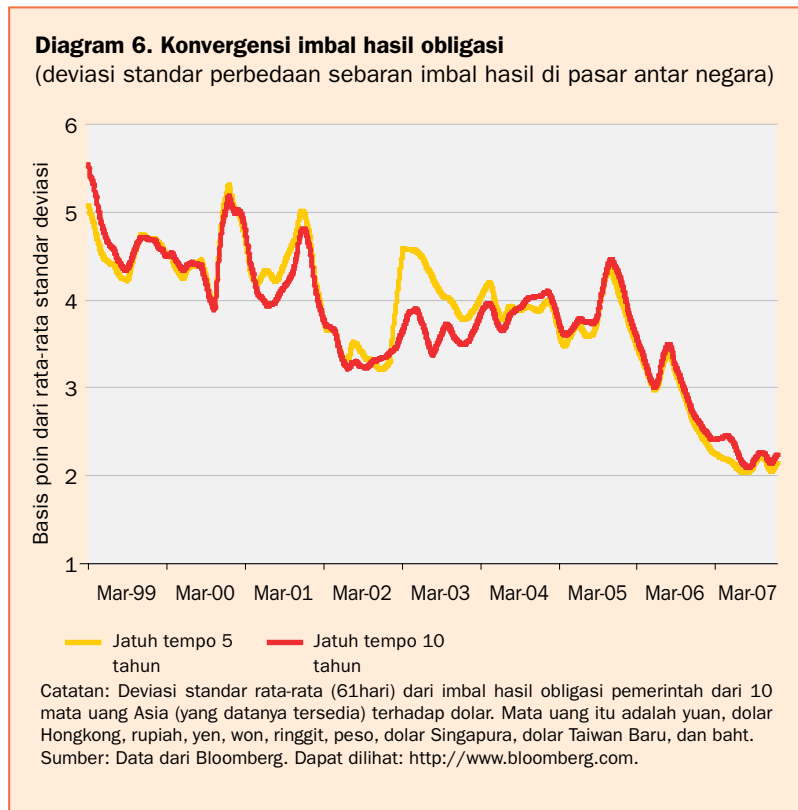
Uni Eropa mencakup ke-15 anggota awal.

Sumber: Data dari *Asian Bonds Online 2007*, IMF 2007b, BIS 2008, World Bank 2007, dan World Federation of Exchanges 2007.

Integrasi keuangan regional

Saling ketergantungan keuangan semakin meningkat, baik di antara negara-negara dalam kawasan itu sendiri maupun dengan negara-negara lain di dunia. Sebagian dari buktinya tampak pada pergerakan harga: tingkat suku bunga di Asia telah semakin mengarah pada

konvergensi selama dekade terakhir ini. Meskipun integrasi pasar masih jauh dari selesai, standar deviasi dari imbal hasil obligasi lintas batas telah turun drastis sejak krisis (Diagram 6). Korelasi indeks harga saham di seluruh pasar regional juga meningkat, dan sekarang lebih tinggi dari AS dan pasar saham global lainnya. (Hal ini belum terjadi pada tingkat pengembalian obligasi.)



Bukti menyangkut portfolio penguasaan aset juga menunjukkan saling ketergantungan yang meningkat (Tabel 4). Penduduk Asia non-Jepang menginvestasikan 28% dari portfolio mereka di Asia tahun 2006, meningkat dari 21% tahun 2001, sementara penguasaan mereka akan aset AS menurun dari 20% menjadi 15% dalam jangka waktu yang sama. Kalau Jepang dimasukkan, gambarannya berubah: karena penguasaan aset oleh penduduk Jepang terdiri dari surat-surat berharga non-Asia secara tidak proporsional sehingga pangsa aset Asia yang dikuasai secara regional tahun 2006 hanyalah 10%.

Secara keseluruhan, aset non-Asia merupakan pangsa yang tidak

Tabel 4: Mendalamnya integrasi keuangan: investasi portofolio (\$ milyar)

Negara Pelapor	Aset ditanamkan di					Kewajiban diterima dari				
	Asia Tanpa Jepang	Jepang	Asia	AS	Total	Asia Tanpa Jepang	Jepang	Asia	AS	Total
2001										
Asia Tanpa Jepang	48.6	20.0	68.6	63.6	324.8	48.6	21.8	70.4	125.0	354.0
Pangsa	15.0%	6.2%	21.1%	19.6%	100.0%	13.7%	6.1%	19.8%	35.3%	100.0%
Jepang	21.75		21.8	490.2	1,289.8	20.0		20.0	197.8	542.3
Pangsa	1.7%		1.7%	38.0%	100.0%	3.7%		3.7%	36.5%	100.0%
Asia	70.4	20.0	90.4	553.8	1,614.6	68.6	21.8	90.4	322.8	896.3
Pangsa	4.4%	1.2%	5.6%	34.3%	100.0%	7.7%	2.4%	10.1%	36.0%	100.0%
2006										
Asia Tanpa Jepang	238.4	28.2	266.6	136.8	941.9	238.4	50.8	289.1	467.4	1,233.4
Pangsa	25.3%	3.0%	28.3%	14.5%	100.0%	19.3%	4.1%	23.4%	37.9%	100.0%
Jepang	50.6		50.6	797.6	2,343.5	28.2		28.2	585.6	1,434.9
Pangsa	2.2%		2.2%	34.2%	100.0%	2.0%		2.0%	40.8%	100.0%
Asia	289.1	28.2	317.4	934.4	3,285.3	266.6	50.8	317.4	1,053.0	2,850.4
Pangsa	8.8%	0.9%	9.7%	28.4%	100.0%	9.4%	1.8%	11.2%	36.9%	100.0%

AS = Amerika Serikat.

Catatan: Asia mencakup Brunei Darussalam; Kamboja; Republik Rakyat Cina; Hongkong (Cina); India; Indonesia; Jepang; Republik Korea; Republik Demokrasi Rakyat Laos; Malaysia; Myanmar; Filipina; Singapura; Taipei (Cina); Thailand; dan Vietnam.

Sumber: perhitungan staf ADB berdasarkan IMF 2007a.

proporsional dari total investasi portofolio dari kawasan itu, meskipun pangsa ini menurun perlahan-lahan.

Jadi, pasar keuangan kawasan ini lebih dalam dan lebih canggih daripada satu dekade yang lalu. Tetapi meskipun kerangka kerja hukum dan peraturan telah membaik, banyak negara masih tertinggal dalam praktek terbaik global. (Lee 2007). Di beberapa negara, perbedaan ini diperburuk dengan pembatasan terhadap transaksi neraca modal dan terhadap masuknya bank serta perusahaan keuangan asing lainnya. (Chinn dan Ito 2007). Semua persoalan ini perlu ditangani secara nasional dan regional jika lebih banyak simpanan Asia yang besar itu ingin ditarik masuk untuk mengisi peluang investasi dalam kawasan itu sendiri.

Menuju pasar keuangan yang efisien dan terpadu

Kerjasama keuangan Asia jelas telah meningkat semenjak krisis dan berbagai forum antar pemerintah kini mendukung kerjasama antara para menteri keuangan, gubernur bank sentral dan regulator pasar modal. Kerangka kerja ini dibahas secara lebih rinci di bawah ini, tetapi hasilnya yang penting termasuk Prakarsa Pasar Obligasi Asia (ABMI, diluncurkan 2004), yang telah membantu memperkuat infrastruktur pasar bagi pengembangan obligasi berdenominasi mata uang lokal, dan Prakarsa Dana Obligasi Asia (ABF), yang telah mendukung pengembangan dana obligasi regional. Upaya subregional ASEAN memberikan suatu model bagi kerjasama yang terus kian mendalam: disamping melakukan pengawasan secara teratur, ASEAN telah merancang peta jalan jangka panjang untuk mengembangkan pasar modal dan menerapkan liberalisasi neraca modal dan jasa keuangan. Yang dilakukan bagi pengembangan pasar modal, misalnya, mencakup berbagi informasi, harmonisasi, perdagangan, kliring dan penyelesaian, dan bahkan peluncuran reksa dana yang dapat diperdagangkan di pasar modal (ETF).

Secara teori, hubungan dengan pasar global dapat menyediakan seluruh manfaat integrasi keuangan, dengan banyak peluang bagi peningkatan modal, pilihan beragam untuk menginvestasikannya, dan pilihan bagus bagi diversifikasi resiko. Tetapi integrasi keuangan regional dapat memainkan peran tambahan yang penting. Zona waktu yang sama dan kedekatan geografis memudahkan aliran informasi dan kontak personal serta dapat membantu mengurangi informasi yang tak selaras. Pasar yang lebih besar, pada gilirannya, dapat mengarah pada layanan keuangan yang lebih efisien dan kompetitif. Di kebanyakan kawasan besar, faktor ini menimbulkan “bias investasi di wilayah sendiri” yang cukup berarti—kecenderungan transaksi keuangan suatu wilayah dilakukan secara tidak proporsional dengan rekanan regional.⁵

Tetapi, di Asia, bias itu tampaknya berbalik—transaksi keuangan kelihatannya lebih berpihak pada rekanan di luar kawasan. Pola ini kelihatannya mencerminkan hambatan yang masih berlanjut terhadap transaksi keuangan lintas batas dan juga menunjukkan adanya potensi manfaat yang cukup penting dari keselarasan ketentuan, peraturan,

⁵ Bias negara sendiri seringkali ditujukan pada hal yang berlebihan relatif terhadap pengharapan teoritis di banyak negara, dan dalam kasus seperti itu biasanya dikaitkan dengan peraturan yang membatasi transaksi lintas batas atau akses yang tak memadai akan informasi mengenai peluang investasi global.

standar dan praktek pasar, serta dari liberalisasi neraca modal. Pasar regional yang terintegrasi dapat membantu menemukan informasi yang lebih dalam dan mutakhir akan peluang investasi Asia, dan mungkin sangat efektif, misalnya, dalam menyesuaikan produk dan layanan keuangan bagi usaha menengah dan kecil serta konsumen dan investor regional. Pasar keuangan terintegrasi juga dapat membantu mengembangkan pendekatan baru untuk membiayai kebutuhan investasi infrastruktur yang besar dari kawasan itu.

Perkembangan lebih lanjut dalam integrasi keuangan regional bakal perlu menangani sebab-sebab fundamental—kelemahan dalam sistem keuangan nasional, perbedaan dalam peraturan keuangan nasional, dan ketimpangan pembukaan pasar dan liberalisasi pasar modal. Ada konsensus yang bertumbuh bahwa banyak yang dapat dan harus dilakukan berkenaan dengan isu-isu ini di tingkat regional, baik untuk memperbaiki efisiensi pasar maupun untuk mencegah kejutan finansial. Tujuan ini dapat dicapai melalui kebijakan yang melakukan hal berikut:

- **Meningkatkan pengawasan terhadap pasar keuangan.** Institusi yang menjalankan pengawasan yang berarti dan menangani isu-isu peraturan biasa merupakan *sine qua non* (apa yang seharusnya ada di dalam) kerja sama regional. Tujuan ini dapat ditempuh dengan sebaik-baiknya melalui pembentukan “Dialog Stabilitas Keuangan Asia” tingkat tinggi yang baru mengenai isu-isu sektor keuangan, untuk bekerja secara paralel dengan Dialog Evaluasi dan Kebijakan Ekonomi (ERPD), yang menangani kerja sama ekonomi makro. “Dialog Stabilitas Keuangan Asia” akan mempertemukan pihak berwenang yang bertanggungjawab—termasuk menteri keuangan, otoritas bank sentral dan pengawas serta regulator keuangan lainnya—untuk menangani kerapuhan pasar keuangan, peraturan dan usaha integrasi, juga untuk melibatkan diri dalam dialog dengan sektor swasta.
- **Mempromosikan standar yang konsisten dan pengakuan timbal balik.** Sebagian besar negara Asia masih perlu meningkatkan norma-norma kehati-hatian, peraturan dan pengawasan serta standar bagi tata kelola usaha dan transparansi. Standar yang diselaraskan akan memfasilitasi peraturan sektor keuangan di seluruh wilayah hukum dan akan menurunkan biaya informasi dan transaksi bagi investor. Mengingat bahwa harmonisasi menimbulkan tantangan besar bagi negara-negara Asia yang beragam, para pengambil kebijakan di kawasan ini mungkin perlu mengambil pendekatan bercabang dua: mengembangkan panduan bagi praktek terbaik (dasar penting bagi harmonisasi); dan menetapkan standar minimum yang dapat diterima, awalnya paling tidak diberlakukan di antara sebagian wilayah dari negara-negara itu.
- **Memperkuat pasar keuangan dan infrastrukturnya.** Pasar

keuangan yang lebih dalam dan lebih inovatif dapat dipromosikan dengan memperluas inisiatif resmi yang mendukung seperti ABMI dan ABF. Ini telah meningkatkan standar yang diharapkan bagi penyingkapan informasi dan dokumentasi serta menarik para emiten dan investor internasional baru ke pasar regional. Kelompok kerja ABMI tengah mempertimbangkan perbaikan luas, termasuk pengembangan instrumen sekuritisasi hutang, garansi kredit regional, sistem penyelesaian transaksi dan kliring, dan badan-badan peringkat. Karena banyak pasar keuangan Asia yang secara individual kekurangan sumber daya untuk membangun infrastruktur transaksi yang memadai—untuk meningkatkan kualitas kredit, pembayaran dan penyelesaian, serta pertukaran informasi—koordinasi di antara mereka merupakan hal yang penting untuk dapat mencapai skala keekonomian yang tepat.

- **Menerapkan liberalisasi neraca transaksi modal dan arus jasa keuangan lintas batas secara berhati-hati.** Sistem keuangan yang efisien memerlukan kompetisi dan skala keekonomian—yang pada akhirnya membawa pemaparan pasar dan perusahaan keuangan nasional pada kompetisi internasional. Di banyak negara Asia, sistem keuangan yang efisien telah dibuat; di negara-negara lain, manfaat integrasi terhadap resiko liberalisasi masih harus ditimbang. Untuk negara-negara yang belakangan disebut, kemajuan perlu diukur dan harus berhati-hati; liberalisasi yang berlanjut penting sekali tetapi ini perlu disertai dengan pengembangan institusi yang dapat memastikan bahwa pasar akan terus stabil.

Negara-negara Asia menghadapi tugas yang berat, namun penting untuk membangun sistem keuangan kelas dunia. Agendanya banyak bersifat nasional tetapi kawasan ini sebagai keseluruhan merupakan pemangku kepentingan utama. Kerja sama keuangan regional dapat menyediakan forum dialog dan berbagi informasi, kerangka kerja bagi pembuatan standar yang dapat saling diterima, dan tekanan dari sesama negara dalam kawasan ini untuk mempercepat adopsi kebijakan yang sulit. Ini dapat membantu pengembangan pasar yang lebih luas dan dalam—sehingga pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas tabungan kawasan itu yang sungguh besar jumlahnya.

5. Mengelola saling ketergantungan ekonomi makro

Perdagangan yang bertumbuh dan hubungan keuangan dengan cepat diterjemahkan menjadi saling ketergantungan ekonomi makro. Implikasinya adalah bahwa penguasa nasional kian perlu mendasarkan kebijakan mereka pada apa yang diharapkan dilakukan oleh tetangga mereka. Implikasi lainnya adalah bahwa manfaat pengelolaan kebijakan secara bersama-sama—untuk memaksimalkan kinerja bersama—menjadi lebih besar. Sebagai hasilnya, para pembuat kebijakan di Asia secara aktif mencari jalan untuk mengelola merebaknya kejutan (*shock*) regional dan global, dan untuk mengurangi kondisi keuangan yang tidak stabil dan ketidak-sesuaian nilai tukar. Dalam jangka panjang kerja sama ekonomi makro yang lebih erat juga akan membantu memperkuat hubungan struktural kawasan ini.

Kajian ini mendapati bahwa

- Saling ketergantungan ekonomi makro regional Asia kian mendalam,
- Kebijakan ekonomi makro Asia sejauh ini menunjukkan sedikit bukti akan konvergensi,
- Asia menghadapi penyesuaian ekonomi makro yang bisa jadi cukup besar sebagai bagian dari resolusi akhir dari ketidakseimbangan pembayaran global, dan
- Kerja sama regional akan menjadi penting untuk mengelola tantangan ekonomi makro global dan regional dan untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas.

Sementara sebagian besar negara Asia menunjukkan kinerja yang baik pada tahun-tahun belakangan ini, kestabilan mereka diperoleh dengan latar belakang lingkungan global yang ramah—yang tampaknya telah berakhir dengan kekacauan finansial yang bermula di AS musim panas 2007. Memandang ke depan, konteks globalnya tampak akan memerlukan lebih banyak berubah. Misalnya, dalam hal resesi AS atau pelambanan global, Asia akan perlu menyesuaikan fokus pertumbuhannya kembali dari pasar-pasar yang pertumbuhannya melambat atau pangsanya menyusut, menuju ke pasar yang pertumbuhannya lebih cepat, termasuk dari ekspor ke luar

Asia menuju pemenuhan permintaan dari dalam kawasan ini sendiri. Bahkan meskipun tidak dipaksakan oleh perkembangan ekonomi makro jangka pendek, penyesuaian ini tetap akan penting nantinya untuk menyelesaikan ketidakseimbangan pembayaran global.

Tumbuhnya saling ketergantungan

Dari beberapa alasan yang menunjukkan bahwa saling ketergantungan yang lebih besar mungkin akan menyebabkan variabel-variabel ekonomi makro Asia bergerak bersama-sama lebih erat, ada tiga alasan yang terpenting. Pertama, karena perdagangan Asia mencakup pangsa besar suku cadang dan komponen, kejutan (*shock*) khusus di industri tertentu tampaknya akan menyebar dengan cepat ke seluruh kawasan. Kedua, karena Eropa dan AS tetap merupakan pasar ekspor utama bagi barang jadi Asia, kejutan yang berasal dari pasar eksternal terhadap perekonomian negara-negara Asia cenderung serupa. Ketiga, pasar Asia sendiri menjadi kian penting untuk mendorong kegiatan ekonomi regional.

Korelasi output, indikator yang paling sering dipakai dalam saling ketergantungan, telah meningkat dengan tajam di antara negara-negara Asia yang sedang berintegrasi secara ekonomi. (ADB 2007b, Kawai dan Motonishi 2005, Kim dan Lee 2008, McKinnon dan Schnabl 2002). Suatu analisa yang tercakup dalam kajian utama menunjukkan bahwa pergerakan bersama PDB kuartalan meningkat secara dramatis setelah krisis Asia dan sejak itu tetap tinggi—rata-rata koefisien untuk korelasi berpasangan di negara-negara Asia tersebut telah meningkat dari 0,07 sebelum krisis menjadi 0,54 setelah itu. Tetapi, seperti yang ditunjukkan dalam beberapa kajian lain, negara-negara Asia yang sedang berintegrasi secara ekonomi tetap erat terhubung dengan bagian dunia yang lain—nyatanya korelasi dari negara-negara Asia ini dengan UE dan AS meningkat dari 0,16 sebelum krisis menjadi 0,51 setelah itu. Hasil-hasil kajian ini secara luas dikonfirmasi dengan menggunakan teknik otoregresi vektor dalam kajian utama. Jalinan harga juga tampak lebih kuat dari sebelum krisis. Korelasi rata-rata dari harga konsumen kuartalan (*detrended*) dan disesuaikan bagi perubahan nilai tukar nominal) terhadap pasangan negara-negara Asia meningkat dari 0,10 sebelum krisis menjadi 0,39 setelah itu. Ini menunjukkan bahwa negara-negara Asia menghadapi kejutan harga yang lebih serupa daripada negara lain di dunia, atau kejutan harga di suatu bagian kawasan itu diteruskan kepada yang lain dengan tenaga yang lebih besar, atau harga-harga Asia lebih sensitif terhadap kejutan eksternal. Korelasi tak dapat membedakan antara alternatif ini, tetapi ketiga-tiganya tampaknya berjalan.

Dengan demikian, saling ketergantungan ekonomi makro telah

meningkat: Asia yang lebih terintegrasi telah menjadi kian sensitif terhadap kejutan Asia. Pada saat yang sama, kepekaan kawasan ini terhadap kejutan global tetap tinggi, meskipun tampaknya agak berkurang. Hasil-hasil kajian ini menawarkan suatu perspektif yang menarik mengenai perdebatan apakah Asia “memisahkan diri” (*decoupling*) dari siklus bisnis global. Satu sisi melihat pendorong aktivitas ekonomi Asia terbesar saat ini berasal dari kawasan regional, sedangkan sisi lain melihat bahwa yang terbesar berasal pasar global. Temuan kajian menunjukkan suatu perspektif yang lebih tajam dan dinamis. Tuntutan regional memang lebih penting bagi pertumbuhan ekonomi Asia dari sebelumnya. Tetapi, sebagai hasil globalisasi, aktivitas ekonomi dalam UE dan AS tetaplah penting: pasar ini masih merupakan tujuan kunci bagi ekspor barang jadi Asia. Jika *decoupling* berjalan, hal ini akan terjadi secara bertahap sementara kepentingan relatif dari pendorong tuntutan Asia berubah. Sementara itu, faktor-faktor yang murni nasional —pendorong ketiga aktivitas Asia— telah jelas berkurang pentingnya relatif terhadap kekuatan regional dan global, karena konteks negara-negara di kawasan ini yang kian terbuka.

Kurangnya konvergensi Kebijakan

Meskipun ada konvergensi dalam hasil ekonomi makro regional, hanya ada sedikit bukti akan konvergensi kebijakan ekonomi makro. Kebijakan moneter telah mengikuti tren luas yang serupa, tetapi divergen dalam rincian. Setelah konvergen hingga 2004, kebijakan kawasan ini sejak itu (hingga awal 2008) menjadi beragam—mulai pengetatan yang terus-menerus di RRC dan Taipei (Cina), hingga pengetatan yang makin tajam diikuti dengan pelonggaran di Indonesia dan Malaysia, dan hingga kemudian pengetatan bertahap di Thailand dan Republik Korea. Strategi yang diumumkan juga berbeda: Indonesia, Republik Korea, Thailand dan Filipina mempunyai kerangka kerja formal yang menargetkan inflasi, sedangkan yang lain mengikuti kebijakan yang lebih bervariasi dan pada beberapa kasus secara khusus menargetkan kestabilan nilai tukar. Perbedaan kebijakan ini turut menyebabkan inflasi dan suku bunga menjadi sangat beragam di kawasan ini.

Kebijakan fiskal juga beragam, meskipun tak seberagam kebijakan moneter. Tingkat hutang publik di sebagian besar negara Asia telah turun sejak 2000, tetapi konsolidasi fiskal kurang berhasil di India dan terutama Jepang, yang hutang publiknya mencapai tingkat tinggi yang kritis. Tahun 2008, posisi fiskal masih berkisar dari defisit sekitar 6% dari PDB untuk India dan Jepang hingga surplus 10% di Singapura. Sedikit banyak, perbedaan ini juga mencerminkan variasi dalam tingkat pembangunan di kawasan ini dan tujuan kebijakan nasional.

Sistem nilai tukar juga berbeda-beda. Sebelum krisis sebagian besar negara mengklaim bahwa mereka telah menerapkan sistem nilai tukar mengambang terkendali (*managed float*), tetapi dalam praktek mata uang mereka dengan ketat membuntuti dan kadang dipatok terhadap dolar AS. Setelah krisis menyebabkan sistem ini runtuh, megara-negara yang terkena dampaknya secara temporer mengadopsi rejim yang lebih fleksibel, dengan Malaysia sebagai perkecualian yang mencolok. Tapi begitu keadaan tenang kembali, negara-negara kembali berusaha mengimplementasikan sistem nilai tukar mengambang terkendali untuk mengurangi ketidakpastian mata uang. Dalam kejadian yang lebih baru, sejumlah negara yang menerapkan sistem nilai tukar seperti di atas, khususnya RRC, menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar.

Meskipun tren jangka medium mata uang Asia masih mengikuti dolar AS dengan ketat, pergerakan mereka dengan euro dan yen meningkat dalam tahun-tahun belakangan ini. Ini telah menghasilkan tingkat nilai tukar riil efektif yang luar biasa stabil: variasi dalam kawasan ini lebih rendah pada 2004–2006 daripada dalam periode yang dapat dibandingkan selama 17 tahun terakhir (Tabel 5). Tetapi tampaknya kestabilan ini bukan merupakan produk keputusan kebijakan yang disengaja, dan tak ada rezim formal yang ada untuk meyakinkan bahwa stabilitas akan berlanjut. Memang, tampaknya ini sudah berakhir, mulai dengan kondisi pasar yang kian bergolak yang terjadi karena dolar AS mulai merosot pada awal 2006 dan yen mulai menguat pertengahan 2007.

Tabel 5. Menurunnya varian pergerakan nilai tukar riil

	1989– 1991	1992– 1994	1995– 1997	1998– 2000	2001– 2003	2004– 2006
Nilai tukar nominal	65.9	86.8	33.2	432.8	24.3	16.4
Inflasi IHK	17.0	17.7	11.0	71.8	11.3	8.8
Nilai tukar riil	62.0	45.4	37.2	234.0	32.1	22.8

IHK = Indeks Harga Konsumen.

Catatan:

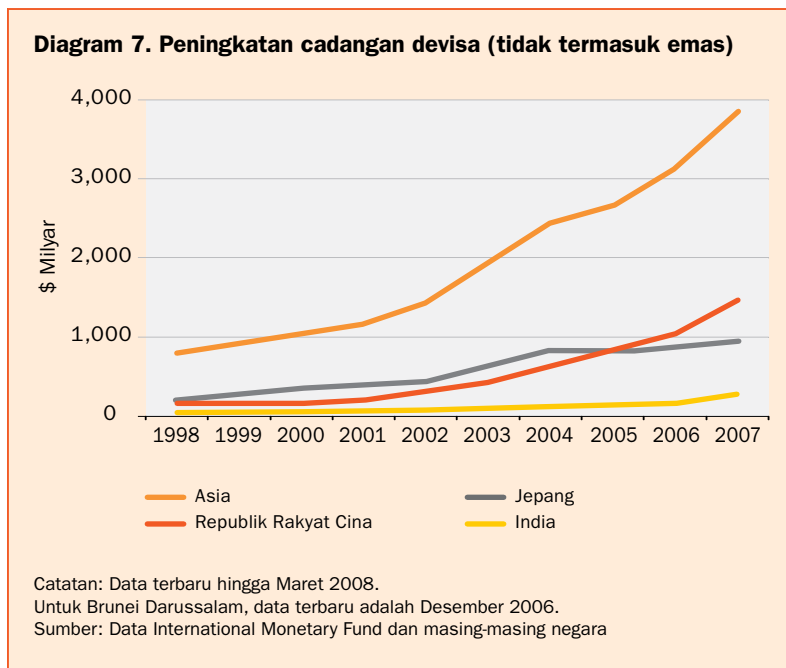
Negara-negara yang termasuk analisa ini adalah: Republik Rakyat Cina,; Hongkong, Cina; India; Indonesia; Jepang; Republik Korea; Malaysia; Filipina; Singapura; Taipei, Cina; dan Thailand.

Angka-angka merupakan varians persentase deviasi tahunan terhadap rata-rata sederhana, dikalikan 10,000 untuk kemudahan presentasi. Persentase deviasi diestimasi dengan turunan pertama dalam logaritma.

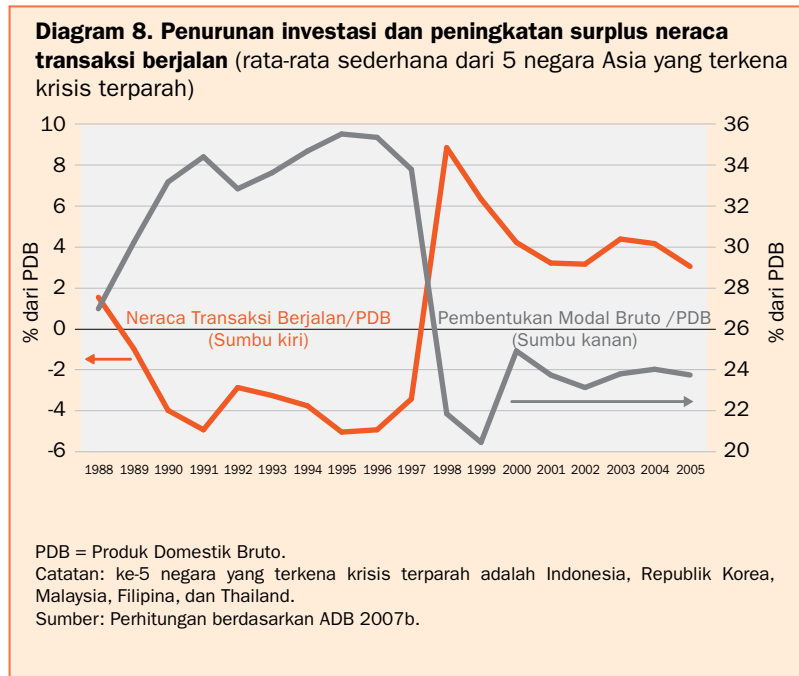
Sumber: Perhitungan berdasarkan IMF 2007c dan ADB 2007b.

Penyesuaian berikutnya

Pertumbuhan Asia yang pesat dan saling ketergantungan yang meningkat harus mengarah kepada investasi Asia yang besar di pasar mereka sendiri dalam kawasan ini. Tapi tabungan yang tinggi dan tuntutan domestik yang relatif lemah alih-alih menghasilkan surplus neraca transaksi berjalan (*current account*) yang besar dan persisten, yang mengarah kepada peningkatan besar dalam cadangan mata uang asing kawasan ini (Diagram 7). Enam negara Asia—RRC; Hongkong (Cina); Jepang; Malaysia; Singapura; dan Taipei (Cina)—memiliki surplus neraca transaksi berjalan yang setara dengan 60% dari defisit neraca transaksi berjalan AS sebesar \$810 milyar tahun 2006. Ketimpangan ini mungkin tidak berkelanjutan, khususnya karena bobot Asia dalam ekonomi dunia terus meningkat. Jadi, ada berbagai alasan untuk menjajagi bagaimana permintaan Asia mungkin menjadi pendorong yang lebih penting bagi produksi regional.



Ada banyak potensi untuk meningkatkan investasi di banyak negara Asia. Dalam beberapa negara, khususnya yang paling terkena dampak krisis secara langsung, investasi telah menurun tajam sejak krisis dan pertumbuhan belum kembali pada tingkat seperti dulu sebelum krisis (Diagram 8). Investasi telah meningkat di beberapa



negara akhir-akhir ini—termasuk Indonesia dan Thailand—tetapi masih rendah dibandingkan dengan sebelum krisis. Tingkat investasi sebelum krisis mungkin tidak berkelanjutan di semua negara Asia, tetapi untuk beberapa negara tingkat investasi setelah krisis tetaplah jauh di bawah potensi jangka panjang. Ada juga peluang untuk peningkatan konsumsi di beberapa negara. Kosumsi rumah tangga di RRC yang sudah rendah, anjlok dari 48% dari GDP tahun 2000 menjadi 38% tahun 2006. Beberapa penyebab tingginya tabungan perusahaan dan rumah tangga adalah efek samping dari pertumbuhan ekonomi RRC yang luar biasa. Tetapi ada juga penyebab lain yang muncul dari institusi dan kebijakan ekonominya. Misalnya, inovasi keuangan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dengan memungkinkan konsumen mengalokasikan pendapatan seumur hidup mereka dengan lebih efisien. Pajak yang lebih seimbang dan kebijakan dividen dapat membuat pemerintah mendapatkan bagian yang lebih besar dari keuntungan luar biasa dari sektor perusahaan (baik swasta maupun pemerintah). Sumber daya ini pada gilirannya dapat digunakan untuk membiayai layanan kesehatan dan pendidikan yang mahal, membentuk jaring keamanan sosial dan sistem pensiun, sehingga dengan sendirinya menyebabkan tingginya tabungan rumah tangga. Banyak dari persoalan ini yang dipahami dengan baik oleh RRC, dan telah diadopsi berbagai rencana untuk meningkatkan pengeluaran pada bidang-bidang ini, yang saat ini hanya berjumlah 3% dari PDB

(Lardy 2007). Di Jepang, pemulihan penuh pendapatan pribadi dan meningkatnya rasio ketergantungan manula juga harus mengarah pada peningkatan tingkat konsumsi.

Resolusi ketimpangan pembayaran global—terlepas dari seperti apa perubahan dalam komposisi pengeluaran (rumah tangga, perusahaan atau pemerintah) nantinya—tampaknya memerlukan penyesuaian besar dalam nilai tukar riil. Ini akan menjadi tantangan; penyesuaian dengan skala sebesar yang diharapkan ini akan dapat memicu berbagai jenis gangguan, baik dalam kawasan yang defisit maupun surplus. Tidak banyak waktu bagi perencanaan di masa depan: tingkat tabungan di AS sedang meningkat sedangkan dolar AS telah mengalami depresiasi dengan tajam setelah periode apresiasi yang berkepanjangan, termasuk terhadap yen. Terkuaknya tren-tren ini membawa dilema bagi pembuat kebijakan: kalau mereka berusaha memelihara kestabilan nilai tukar terhadap dolar AS yang jatuh hal ini akan menimbulkan resiko mengimpor inflasi; kalau membiarkan nilai tukar menguat, otonomi moneter akan terpelihara, tetapi dapat mengancam daya saing ekspor dan akan menggerus nilai cadangan dolar AS Asia yang berjumlah besar. Untuk kompensasi atas pengembalian yang rendah pada penguasaan cadangan dan kerugian karena depresiasi dolar, sejumlah negara telah memutuskan untuk mengalokasikan sebagian cadangan devisa ke dalam lembaga investasi milik pemerintah (*sovereign wealth fund*) yang makin berkembang ataupun lembaga yang baru didirikan.⁶

Mekanisme bagi kerja sama ekonomi makro

Mekanisme regional jelas diperlukan untuk menangani saling ketergantungan ekonomi makro Asia, tetapi kerja sama kebijakan dalam bidang ini masih seumur jagung. Struktur dasar tengah terbentuk, terdiri dari Prakarsa Chiang Mai (CMI)—fasilitas keuangan kawasan ini yang sedang berusaha mengepakkan sayapnya—dan beberapa forum regional untuk dialog ekonomi makro. Yang paling maju adalah insitusi subregional; proses pengawasan ASEAN, misalnya, terdiri dari laporan konfidensial diskusi dan sesi tinjauan rekan sekelompok.⁷ Tinjauan Ekonomi dan Dialog Kebijakan ASEAN+3

⁶ Park (2008) memperkirakan bahwa deviden tahun fiskal 2006 Republik Rakyat Cina (RRC) dari peralihan dana cadangan ke *sovereign wealth fund* bisa menghasilkan tambahan \$43 milyar dalam pendapatan tahunan.

⁷ Asian Development Bank mendukung proses ini melalui kajian-kajian khusus *ASEAN Economic Outlook* dan bantuan teknis.

(ERPD) tidak begitu formal dan lebih interaktif, tetapi memiliki keanggotaan yang lebih luas—Pertemuan Menteri Keuangan telah terbukti cukup efektif. Pertemuan Eksekutif Bank Sentral Asia Timur-Pasifik (EMEAP) mempunyai fungsi serupa bagi bank-bank sentral.⁸

CMI, yang diluncurkan 2000, memungkinkan negara-negara untuk meminjam likuiditas internasional yang dijamin dalam mata uang domestik. Tetapi pertukaran bilateral CMI masih terbatas, khususnya sebagai pelengkap dukungan keuangan yang diterima oleh anggota Dana Moneter Internasional (IMF). CMI telah diperluas dan diperkuat semenjak didirikan—misalnya jumlah total pertukaran fasilitas *swap* itu telah mulai meningkat hingga sejumlah \$85 milyar pada akhir 2007 dan plafon bagi pengaktifan fasilitas pertukaran (*swap*) tanpa program IMF dinaikkan dari 10% menjadi 20% tahun 2005. Para pejabat ASEAN+3 sekarang ada pada tahap lanjut dalam membuat CMI multilateral dan menggalakkan integrasi yang lebih erat dengan ERPD. Penguatan CMI yang terus berlanjut akan mendorong negara-negara untuk menghemat cadangan valuta asing mereka. *Sovereign wealth fund* kemudian dapat menyediakan kendaraan untuk melakukan diversifikasi cadangan devisa menjadi aset yang menghasilkan pengembalian lebih tinggi meski juga lebih mengandung resiko. Kalau dikelola dengan basis independen, transparan dan komersial, *sovereign wealth fund* dapat membuat “kolam” tabungan yang stabil dan dalam, yang tersedia bagi investasi di kawasan itu dan juga di seluruh dunia serta dapat membantu merangsang pembangunan pasar modal regional.

Untuk menjawab tantangan potensial yang akan datang, mekanisme kerja sama ekonomi makro kawasan ini memerlukan fokus yang lebih tajam, yang lebih tidak saling tumpang tindih, dan struktur institusional yang lebih dalam.

Tujuan ini dapat dicapai melalui cara berikut ini:

- **Melakukan konsultasi dan pengawasan ekonomi makro yang lebih efektif.** Untuk meminimalkan duplikasi dan khususnya untuk mengkoordinasikan kerja sama ekonomi regional, harus dibentuk “Sekretariat Asia untuk Kerja Sama Ekonomi” yang efektif, dengan staf regional yang bermutu dan permanen. Sekretariat ini akan paling logis bekerja di bawah pengawasan ASEAN+3 dan di bawah koordinasi bank-bank sentral di kawasan itu, tetapi fungsi yang ditangani harus mencakup keanggotaan yang beragam, termasuk negara-negara diluar ASEAN+3. Sekretariat ini dapat memperkuat fungsi pengawasan utama ASEAN+3 dengan memfasilitasi kesepakatan eksplisit mengenai

⁸ Forum subregional bank sentral lainnya termasuk Asia Tenggara, Selandia Baru, Australia (SEANZA), Bank Sentral Asia Tenggara (SEACEN), dan Forum Bank Sentral Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

instrumen, indikator-indikator dan standar yang digunakan untuk memantau kegiatan ekonomi. Contohnya, Sekretariat dapat memperkenalkan sistem peringatan dini secara regional untuk membantu mencegah krisis keuangan atau membentuk keranjang mata uang teoritis seperti “unit mata uang Asia” untuk memantau pergerakan mata uang tertentu terhadap patokan mata uang regional.

- **Memperkuat fasilitas pembiayaan jangka pendek Asia.** Menyatukan cadangan valuta asing yang besar dan menyempurnakan aturan-aturan yang digunakan merupakan hal penting dalam pengelolaan krisis yang efektif. Membuat CMI menjadi multilateral dan menyepakati aturan-aturan bagi pengaktifannya yang cepat dapat menjadi langkah kritis. Sekretariat akan mengawasi sumber daya kawasan itu yang disatukan itu dan, dalam krisis, melakukan negosiasi kebijakan ekonomi dengan pemerintah-pemerintah yang mencari dukungan. Dengan demikian Sekretariat ini akan melengkapi pengawasan IMF dan usaha pengelolaan krisis di Asia, dan pada waktunya, hubungan antara aktivasi CMI dan program IMF dapat dihapuskan secara bertahap.
- **Bekerja sama dalam mengelola kebijakan kurs valuta asing dan ekonomi makro.** Dengan kian mendalamnya hubungan struktural Asia, nilai tukar dan kerja sama ekonomi makro menjadi makin penting. Kerja sama dapat dimulai dengan pemahaman untuk menjalankan kebijakan, dan dengan suatu tindakan terkordinasi *ad hoc*. Misalnya, negara-negara dapat mengkoordinasikan pergerakan tertentu dari penyesuaian nilai tukar terhadap mata uang negara ketiga agar posisi kompetitif relatif mereka tetap stabil. Kerja sama seperti itu mungkin muncul pertama-tama di ASEAN atau di kelompok lain dengan siklus bisnis yang sangat sinkron. Meskipun begitu, karena tingkat pertumbuhan di kawasan ini sangat beragam, setiap bentuk kerja sama nilai tukar harus cukup fleksibel sehingga memungkinkan terjadinya penyesuaian nilai tukar riil dari waktu ke waktu.

Era stabilitas ekonomi makro belakangan ini mungkin sudah berakhir; memang masa ini tidaklah abadi. Dengan prospek yang divergen, adanya tuntutan yang berbeda terhadap suatu kebijakan, dan pengaturan kembali besar-besaran di masa mendatang, kerja sama kebijakan Asia menjadi penting. Asia perlu mengembangkan institusi-institusinya untuk membuat hal ini bisa berjalan dan, karena perlu kerja sama selama bertahun-tahun untuk memastikan bahwa proses ini efektif, saat untuk mulai membangun institusi semacam itu telah tiba.

6. Membuat pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam arti yang paling luas: supaya manusia dapat menikmati hidup yang makmur dan berarti. Pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat bagi berbagai lapisan masyarakat merupakan hal penting. Agar manfaat integrasi regional dapat dinikmati setiap orang—termasuk orang miskin dan mereka yang tidak diuntungkan secara sosial—sejumlah besar isu sosial perlu ditangani. Kebijakan publik perlu difokuskan pada “pertumbuhan inklusif” untuk menciptakan kesempatan bagi setiap orang, untuk meningkatkan akses masyarakat akan kesempatan seperti itu, untuk menyediakan jaring pengaman bagi mereka yang terpuruk dalam masa-masa sulit, dan untuk mencapai tujuan sosial dan lingkungan lainnya.

Integrasi Asia mendorong pertumbuhan ekonomi, dan biasanya negara termiskin mendapatkan manfaat terbanyak. Tetapi integrasi ekonomi dapat diasosiasikan dengan efek samping negatif, seperti gangguan yang lebih besar dari sektor-sektor yang terpapar dan dampak negatif kepada orang miskin. Negara yang dengan cepat menuju modernisasi memerlukan kebijakan sosial yang efektif agar pertumbuhan dapat diterima secara luas dan perlu melengkapi mekanisme tradisional (berbasis pada keluarga besar dan masyarakat kecil) untuk mempedulikan mereka yang tertinggal. Negara seperti itu juga perlu menangani isu-isu lain, termasuk ancaman terhadap kesehatan, keamanan dan lingkungan.

Kajian ini mencatat bahwa:

- beberapa kelompok besar telah tertinggal dari kemajuan luar biasa kawasan ini,
- kemiskinan dan eksklusi dapat dikurangi dengan kebijakan pasar tenaga kerja dan investasi,
- migrasi yang meningkat dan kondisi pendatang yang membaik dapat menghasilkan manfaat sosial yang besar,
- institusi yang efektif untuk mengelola kesehatan dan keamanan adalah prioritas yang tak dapat ditawar, dan
- kecenderungan dalam kerusakan lingkungan hidup serius dan

memerlukan perhatian regional.

Bidang-bidang itu perlu mendapat perhatian karena implikasinya yang besar dan juga karena dapat diatur mengikuti aksi regional—dan juga nasional dan global. Setiap bidang memerlukan gabungan kebijakan nasional dan regional yang kompleks, termasuk langkah untuk banyak berbagi pengalaman dan pengetahuan. Kerja sama yang berhasil dalam isu ini akan meningkatkan pemerataan, meningkatkan efisiensi dengan memanfaatkan potensi setiap orang, dan dengan demikian membantu menggerakkan dukungan luas bagi kebijakan yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi.⁹

Siapa yang tertinggal?

Mengingat kompleksnya masalah sosial Asia, usaha untuk mengatasi

Tabel 6. Hasil dari perang melawan kemiskinan

Negara	Indeks Kemiskinan				Tahun Survei	
	\$1 sehari		\$2 sehari		Awal	Akhir
	Awal	Akhir	Awal	Akhir		
Republik Rakyat Cina	28.3	10.8	64.5	37.8	1993	2004
Kamboja	25.5	18.5	76.5	61.6	1993	2004
India	41.8	35.1	85.1	79.6	1993	2004
Indonesia	17.4	7.7	64.2	52.9	1993	2002
RDR Laos	47.8	28.8	89.9	74.4	1992	2002
Malaysia	0.0	0.0	19.2	9.8	1993	2004
Filipina	18.1	13.2	52.7	43.6	1994	2003
Thailand	6.0	0.0	37.5	25.8	1992	2002
Vietnam	27.3	8.4	73.5	43.2	1993	2004

RDR Laos = Republik Demokrasi Rakyat Laos.

Catatan: Indeks Kemiskinan = persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan.

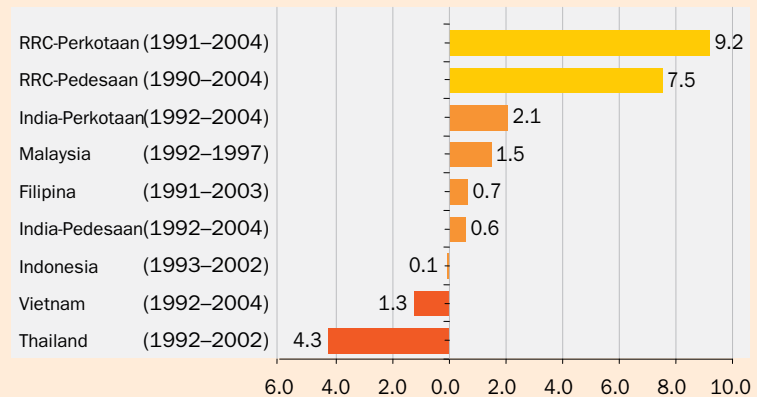
Sumber: Data ADB 2007b.

⁹ Barro (2008) menemukan bahwa ketimpangan berdampak negatif pada pertumbuhan dan ADB (2007b) berargumentasi bahwa ketimpangan yang meningkat menghambat laju pengurangan kemiskinan pada tingkat pertumbuhan setinggi apapun.

kemiskinan dan inklusi memerlukan informasi sistematis mengenai kelompok mana yang tertinggal dan mengapa. Banyak kemajuan telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir—khususnya dalam konteks Tujuan Pembangunan Milenium (MDG)—dengan pemahaman jangkauan dan penyebab kemiskinan, baik dalam dimensi pendapatan atau bukan pendapatan. Pekerjaan ini perlu dilanjutkan, terutama dalam menunjukkan faktor-faktor yang mengarah ke eksklusi—seperti geografi, ketrampilan, usia, gender, dan ras—dan kebijakan yang dapat mengatasinya.

Asia telah membuat kemajuan besar dalam pengurangan kemiskinan (Tabel 6), tetapi tantangan utama tetap ada. Berita yang menggembirakan adalah bahwa Asia tampaknya siap memenuhi MDG untuk mengurangi setengah dari jumlah kemiskinan yang ekstrim menjelang 2015.¹⁰ Setengah dari penduduk Vietnam hidup dengan kurang dari \$1 sehari tahun 1990; jumlahnya menjadi hanya 1 dari 10 di tahun 2004. Di RRC, proporsinya telah turun dari sepertiga menjadi kurang dari sepertujuh. Di Indonesia, negara yang dihantam keras oleh krisis, kemiskinan ekstrim berkurang dua pertiga. Tapi kemajuan di negara lain lebih lamban, khususnya kalau dilihat dengan ukuran bukan pendapatan. Hampir 2 juta penduduk di kawasan ini tidak memiliki sanitasi dasar, lebih dari 650 juta tidak

Diagram 9. Meningkatnya ketimpangan
(perubahan dalam Indeks Gini)



RRC = Republik Rakyat Cina.

Catatan: Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan atau distribusi kekayaan.

Sumber: World Bank 2007.

¹⁰ ADB (2005b) memperkirakan jumlah orang dengan kemiskinan ekstrim (pendapatan kurang dari \$1 sehari) turun dari 921 juta tahun 1990 menjadi 621 juta tahun 2003, sebagian besar karena pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kemajuan lebih lanjut diharapkan terjadi, tetapi menjelang 2015, jumlah orang dengan kemiskinan ekstrim bisa jadi masih tinggi, sejumlah 347 juta, dengan jumlah terbesar di Asia Selatan (274 juta), kebanyakan di India

mempunyai air bersih, 100 juta balita kurang berat badannya dan hampir 30 juta anak usia SD tidak bersekolah (ADB-ESCAP-UNDP 2007).

Perbedaan penghasilan dalam negara-negara juga meningkat.

Diukur dengan koefisien Gini, ketimpangan tampak berkurang di Thailand dan Vietnam, tetapi banyak meningkat di RRC dan India (Diagram 9). Untungnya, ini tidak berarti “yang miskin menjadi bertambah miskin dan yang kaya semakin kaya, tetapi yang kaya menjadi semakin kaya lebih cepat daripada yang miskin” (ADB 2007b, 79). Secara keseluruhan, model pembangunan di kawasan ini berjalan baik, tetapi hasil pembangunan perlu dibagi lebih merata.

Penyebab tumbuhnya ketimpangan bermacam-macam, tetapi, pada umumnya, yang kaya lebih siap untuk mengambil peluang yang ditawarkan oleh perubahan ekonomi.¹¹ Warga di daerah perkotaan rata-rata lebih mampu daripada mereka yang tinggal di desa, tetapi di daerah perkotaan ketimpangan juga melebar. Beberapa kelompok secara sistematis tersingkir dari peluang ekonomi—khususnya perempuan, strata sosio-ekonomi yang lebih rendah, kelompok minoritas, dan penduduk asli. Menangani diskriminasi merupakan hal yang tak dapat ditawar: dalam hal gender, misalnya, inisiatif regional yang berhasil mencakup mulai dari program pengurangan kemiskinan yang peka akan gender hingga peningkatan akses terhadap keuangan dan properti.

Orang juga tertinggal karena nasib buruk—karena bekerja di sektor yang menurun atau menjadi tak bisa bekerja. Pemulihan sejak krisis menjadi topeng bagi berlanjutnya sistem perlindungan sosial Asia yang tidak memadai (ADB 2003b). Penduduk yang menua (Tabel 7) akan meningkatkan tekanan—sistem dukungan keluarga dan komunitas luntur dengan cepat dan harus dilengkapi dengan tersedianya sistem publik. Namun dengan beban biaya yang masih dapat ditanggung: misalnya, Survei Sosial dan Ekonomi Dunia PBB memperkirakan bahwa biaya penyediaan pensiun sebesar \$1 sehari untuk setiap orang berusia lebih dari 60 tahun di negara berkembang yang disurvei hanyalah kurang dari 1% dari gabungan PDB mereka setahunnya (PBB 2007). Inovasi—seperti asuransi mikro, dana sosial berbasis lokal (ADB 2003b), dan dukungan teknologi informasi berbasis masyarakat, juga akan membantu.

Memerangi kemiskinan dan eksklusi

Perang melawan kemiskinan dan eksklusi mulai dengan menciptakan pekerjaan dengan produktivitas tinggi—tujuan utama regionalisme

¹¹ Kelompok dengan pendapatan lebih tinggi memperoleh manfaat dari berbagai faktor yang langsung mempengaruhi produktivitas mereka, seperti kondisi kesehatan dan pencapaian pendidikan yang lebih baik, tingkat kematian bayi dan anak-anak serta imunisasi terhadap penyakit

Asia. Tetapi apakah orang memiliki akses akan pekerjaan ini tergantung dari seberapa bagus pasar tenaga kerja berfungsi dan seberapa efektifnya tempat tinggal mereka terhubung dengan pasar regional dan global yang dinamis.

Tabel 7. Populasi yang menua

Negara	Persentase penduduk usia 65 ke atas terhadap total penduduk			Persentase penduduk usia 65 ke atas terhadap total penduduk usia 15-64		
	2005	2015	2030	2005	2015	2030
Asia						
Brunei Darussalam	3.2	4.3	8.9	4.8	6.0	12.7
Kamboja	3.1	4.0	5.8	5.3	6.2	8.7
Republik Rakyat Cina	7.7	9.6	16.2	10.8	13.4	24.4
Hongkong, Cina	12.0	14.5	25.8	16.4	19.8	40.9
India	5.0	5.8	8.8	8.0	8.8	12.9
Indonesia	5.5	6.6	10.7	8.3	9.6	15.5
Jepang	19.7	26.2	30.6	29.8	42.6	52.3
Republik Korea	9.4	13.3	23.4	13.1	18.2	36.2
Rep. Dem. Rakyat Laos	3.5	3.4	5.6	6.2	5.3	8.4
Malaysia	4.4	5.8	10.4	6.8	8.7	15.4
Myanmar	5.6	6.3	10.9	8.3	8.9	15.8
Filipina	3.8	4.7	7.5	6.4	7.5	11.2
Singapura	8.5	13.5	27.4	11.8	18.2	45.9
Thailand	7.8	10.2	17.4	11.1	14.5	26.6
Vietnam	5.6	5.8	10.9	8.6	8.4	15.8
Dunia						
Total Asia	6.4	7.6	11.7	9.7	11.2	17.4
Uni Eropa	15.9	17.4	22.6	23.3	25.8	35.9
Amerika Utara	12.3	14.3	19.8	18.4	21.6	31.7
Total Dunia	7.3	8.3	11.7	11.4	12.6	18.0

Catatan: "Total Asia" mengacu pada definisi PBB.
Sumber: Divisi Kependudukan PBB 2006.

Tingkat pengangguran resmi Asia tidaklah tinggi menurut standar global tetapi kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan tenaga kerja menjadi kurang responsif terhadap pertumbuhan output (Felipe and Hasan 2006, Kapsos 2006). Hal ini disebabkan antar lain karena data

ketenagakerjaan hanya menangkap sebagian dari apa yang ada. Tahun 2005 sekitar 500 juta dari pekerja Asia yang berjumlah 1,7 milyar diketahui menganggur atau setengah menganggur (Felipe and Hasan 2006). Pasar tenaga kerja informal Asia sungguh besar—berjumlah 83% dari bidang non-pertanian di India dan 71% di Indonesia. Banyak dari hal ini mencerminkan adanya penghalang dalam pasar tenaga kerja, khususnya antara daerah perkotaan dan pedesaan. Undang-undang tenaga kerja yang kaku, pada gilirannya, menyebabkan pengusaha lebih memilih mesin atau tenaga kerja gelap daripada karyawan biasa. Lemahnya hak kepemilikan membuat orang enggan membiayai usaha, karena aset tanpa hak kepemilikan tak dapat digunakan sebagai jaminan (de Soto 2000). Untuk menghilangkan peraturan yang membuat orang yang akan memulai usahanya dan yang mempekerjakan orang harus mengeluarkan banyak uang dan menanggung resiko, secara politis seringkali sulit, tetapi ini tetap penting. (Freeman 2006).

Pendekatan kedua adalah mentargetkan sektor yang kuat dalam pengurangan kemiskinan. Kebijakan yang tepat dalam bidang pertanian—yang merupakan tumpuan banyak penduduk miskin Asia—sangatlah penting. Seringkali, kebijakan nasional salah kaprah: misalnya, memberikan subsidi palawija pokok menghambat diversifikasi atas palawija yang bernilai lebih tinggi dan menghalangi penerapan strategi penanaman dan pemasaran yang lebih produktif. Kebijakan regional yang terfokus juga dapat membawa perubahan. Kesempatan yang lebih besar bagi perdagangan internasional dalam produk-produk pertanian—baik di dalam ataupun di luar kawasan itu—dapat memperkuat usaha nasional untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Bantuan untuk perdagangan dapat juga menjadi sumbangan langsung yang penting akan usaha ini: di Greater Mekong Subregion, misalnya, program inovatif mempromosikan perdagangan pertanian lintas batas dan investasi, dengan didukung dengan kemitraan publik-swasta dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian (ADB 2007b).

Meskipun kebijakan yang tepat telah dibuat, pekerjaan sektor formal yang baru seringkali lebih memihak pada pekerja yangampil, karena perubahan teknis yang bias ketrampilan dan adanya persyaratan kualitas pasar ekspor. Hal ini menguntungkan negara secara keseluruhan—ini meningkatkan produktivitas dan penghasilan rata-rata—tetapi tidak membantu masyarakat yang tidak memiliki, dan tidak mampu mendapatkan, ketrampilan untuk memperoleh pekerjaan baru.

Jadi diperlukan strategi ketiga: mengurangi kesenjangan dalam pendidikan dan infrastruktur yang membuat masyarakat tak mungkin berhubungan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perlu fokus pada pendidikan dasar dan pelatihan kursus serta ketrampilan. Investasi dalam kemampuan memberikan pelatihan—kapasitas untuk belajar bagaimana menggunakan teknologi baru—

sangatlah penting. (Lewis 2004). Survei iklim investasi menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang menghalangi daerah pedesaan untuk mengembangkan usaha dengan produktivitas yang lebih tinggi di luar pertanian (ADB 2007a). Investasi strategis dalam infrastruktur—dalam transportasi, komunikasi dan energi—dapat juga menghubungkan daerah-daerah berpenghasilan rendah dengan pusat dinamika Asia. Pertumbuhan di daerah terpencil dapat menghemat biaya sosial, keuangan, dan relokasi yang sangat besar, dan memberi manfaat bagi masyarakat yang berpindah dan yang tak dapat melakukannya.

Migrasi tenaga kerja

Membuat orang lebih mudah berpindah ke tempat yang menawarkan banyak pekerjaan merupakan hal yang menguntungkan. Ini merupakan kenyataan yang terjadi dengan migrasi dalam suatu negara maupun antar negara-negara. Dari sekitar 200 juta pekerja migran internasional di seluruh dunia, tiga negara yang mengirim pekerja terbanyak ada di Asia—RRC dengan 35 juta, India 20 juta dan Filipina 7 juta (Komisi Global Migrasi Internasional 2005). Jumlah uang yang dikirim pekerja migran melalui saluran resmi lebih dari \$200 milyar setahun, dan mungkin dua kali lipatnya dikirim secara tidak resmi. Dana itu tampaknya digunakan dengan produktif: mereka meningkatkan investasi dalam pendidikan, perumahan, dan usaha rumah tangga (Yang 2006, Lu dan Treiman 2007, Adams 2005). Jika negara kaya membiarkan angkatan kerja mereka bertambah 3% melalui mobilitas pekerja yang lebih besar, negara miskin akan memperoleh kira-kira \$305 milyar per tahun—melebihi hasil yang diperoleh dari penggabungan dampak pembatasan perdagangan yang lebih rendah, pengurangan hutang, dan bantuan (Pritchett 2007). Migrasi dapat juga menyalurkan kelebihan tenaga kerja di negara-negara yang lebih muda dan lebih miskin kepada negara-negara yang lebih tua dan lebih kaya tetapi mengalami kekurangan tenaga kerja, misalnya dalam sektor layanan kesehatan.

Tetapi migrasi perlu dikelola. Kerja sama untuk menghindari penyalah-gunaan—perdagangan perempuan dan tenaga kerja paksaan gelap lainnya—merupakan hal yang penting. Demikian juga tekanan yang lebih besar dari negara lain di kawasan ini untuk melindungi kesejahteraan dan martabat pekerja migran. Konvensi-konvensi internasional termasuk deklarasi ASEAN bagi perlindungan dan promosi hak-hak pekerja migran, sudah menyediakan suatu kerangka kerja, tetapi belum dijalankan dengan baik. Sistem perlindungan sosial berinteraksi dalam cara yang kompleks dengan migrasi; sistem ini perlu dibuat sedemikian rupa hingga berlaku secara internasional, diketahui oleh keluarga pekerja migran, dan mendukung reintegrasi pekerja yang kembali

Kesehatan dan keselamatan: barang publik yang kritis

Karena tingginya kepadatan penduduk dan terbatasnya layanan kesehatan di beberapa negara, Asia sangat rentan terhadap epidemik. Integrasi regional dan kerapnya perpindahan penduduk dan barang meningkatkan kerentanannya. HIV/AIDS¹², sindrom pernafasan akut parah (SARS) dan flu burung menggarisbawahi bagaimana masalah kesehatan lokal dapat menjadi regional. Ancaman ini—dan ancaman yang mungkin timbul di masa mendatang—merupakan resiko masyarakat banyak: resiko ini memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang menghancurkan. Krisis SARS yang berlangsung singkat merugikan negara-negara di Asia sebesar \$20 milyar dari kerugian pariwisata dan produksi, menunjukkan dengan jelas pentingnya pemantauan dan koordinasi internasional dalam pengendalian epidemi (Lee dan McKibbin 2003). Melindungi kawasan ini dari ancaman kesehatan merupakan “barang publik” yang kritis dan jelas merupakan prioritas bagi kerjasama regional.¹³

Tsunami tahun 2004 adalah suatu pengingat terhadap kerawanan kawasan ini terhadap bencana alam yang dapat membawa kehancuran. Kerja sama regional dapat membantu menanggapi bencana dengan lebih cepat, lebih efektif, dan tidak terlalu mahal. Kerja sama harus mencakup sistem peringatan awal regional kalau diperlukan; pengelolaan bencana dan rencana pemulihan; dan pengaturan untuk berbagi informasi, transportasi, dan komunikasi. Inovasi keuangan—seperti pasar asuransi regional yang berhubungan dengan bencana dan banjir—dapat lebih lanjut memperbaiki pengelolaan resiko seperti itu (Lin et al. 2007).

Perlindungan lingkungan

Keprihatinan lingkungan meningkat, khususnya karena pertumbuhan ekonomi di sebagian besar Asia terus digerakkan oleh produksi yang tergantung pada bahan bakar karbon. Banyak pusat perkotaan utama di Asia yang memiliki kualitas udara yang sangat buruk. Sumber-sumber air—

¹² Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia/sindrom yang disebabkan oleh menurunnya system kekebalan tubuh manusia

¹³ Prioritas mencakup penguatan pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai ancaman kesehatan; penetapan pengembangan vaksin dan kapasitas produksi; dukungan bagi pengembangan kapasitas nasional, khususnya dalam pengawasan dan diagnosa; dan pembuatan mekanisme antar pemerintah untuk memerangi penyakit seperti HIV/AIDS dan untuk mengambil tindakan konkret mengenai standar, promosi kesehatan, sistem peringatan dini dan komunikasi.

termasuk di negara pemasok utama air—juga berada di bawah tekanan. Perubahan iklim yang cepat meningkatkan resiko terjadinya bencana alam dan merebaknya penyakit. Semua masalah ini memerlukan konsultasi dan aksi global dan regional yang intensif untuk meneliti masalah dan menentukan solusi dan untuk mengembangkan strategi untuk mengatasinya bersama-sama sehingga tak ada negara yang sangat menderita akibat kebijakan yang diadopsi.

Isu lingkungan lintas batas merupakan keprihatinan khusus bagi kerja sama regional. Masalah seperti penggurunan, badai debu, kebakaran hutan, asap, dan hujan asam merambah batas-batas nasional, solusinya memerlukan upaya kolektif regional. Negara-negara Asia dan organisasi subregional perlu bekerja sama lebih erat untuk menghadapi tantangan lingkungan dengan menyelaraskan standar, peraturan dan undang-undang. Yang menjadi prioritas termasuk polusi udara, degradasi tanah, dan perubahan iklim global, yang cenderung mempengaruhi kebanyakan orang miskin.

Kerja sama subregional terbukti efektif di beberapa daerah. Inisiatif BIMPEAGA¹⁴ mengenai perlindungan lingkungan, misalnya, adalah upaya penting untuk melestarikan satu dari simpanan keaneka-ragaman hayati laut dan tanah terkaya di dunia, dan juga untuk mengelola keberlanjutan jangka panjang dari sumber daya alam subkawasan itu. Ini dan inisiatif subkawasan lainnya menawarkan intervensi dan model yang dapat diterapkan dengan luas di Asia dan seluruh dunia.

Agenda sosial dan lingkungan

Regionalisme Asia tak akan dapat mempergunakan potensinya yang luar biasa besar kecuali kalau kesenjangan dalam negara masing-masing dan di antara mereka dapat diatasi. Jika diserahkan pada kekuatan pasar, integrasi regional Asia akan mengabaikan banyak orang dan dukungan terhadapnya akan luntur. Pemerintah negara-negara kian mengakui hal ini; visi mereka tentang kemakmuran regional bersama memerlukan tindakan koreksi.

Kerja sama regional bisa sangat berguna bagi penanganan langsung isu-isu sosial dan lingkungan yang kritis, kerja sama ini juga dapat memberikan alasan untuk bertindak—seperti yang telah dilakukan MDG secara global—dan dapat menggerakkan dukungan nasional, regional dan global. Jaringan yang lebih dalam antara pembuat kebijakan, lembaga riset dan LSM dapat meningkatkan desain dan implementasi kebijakan. Dan melalui tindakan yang diambil dengan persetujuan bersama, kawasan ini dapat memastikan bahwa dampak kebijakan sosial dan lingkungan terhadap daya saing industri tertentu dan subkawasan diperhatikan dan, jika perlu, ditangani melalui kebijakan

¹⁴ Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina-Daerah Pertumbuhan ASEAN Timur.

yang melengkapi.

Berdasarkan analisa di atas, tujuan utama Asia adalah sebagai berikut,

- **Menghubungkan penduduk miskin dengan ekonomi regional yang berkembang baik.** Kebijakan boleh beragam di seluruh negara, tetapi kebijakan itu harus bertujuan untuk menghilangkan hambatan yang berkaitan dengan peraturan, hambatan sosial dan geografis dalam pasar tenaga kerja; memberikan prioritas pada pembangunan dan perdagangan dalam sektor-sektor, seperti pertanian, yang mempunyai dampak besar untuk mengurangi kemiskinan; mendorong integrasi dalam sektor informal menjadi ekonomi formal; melakukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk membuat pekerja menjadi kian produktif; dan membangun infrastruktur untuk menghubungkan daerah yang kurang beruntung dengan pusat-pusat ekonomi.
- **Mengembangkan sistem perlindungan sosial dengan biaya yang efektif.** Dengan surutnya mekanisme keluarga dan komunitas akan perlindungan sosial, negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah juga memerlukan sistem perlindungan sosial yang memadai. Percobaan baru-baru ini memperluas rentangan solusi yang lebih efektif dalam biaya, sebagian dengan inovasi menggunakan strategi teknologi dan mikro-keuangan.
- **Memfasilitasi dan mengelola migrasi tenaga kerja.** Migrasi nasional dan internasional dapat meningkatkan kehidupan pekerja migran, keluarga mereka dan warga negara tuan rumah. Tantangan bagi negara tuan rumah adalah memaksimalkan manfaat dari mempekerjakan tenaga kerja asing sambil meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi, dan memastikan bahwa para imigran mendapatkan hak-hak dasar dan perlindungan serta diperlakukan sesuai martabat mereka.
- **Melindungi kesehatan dan keamanan regional.** Asia yang berpenduduk padat dan terintegrasi dengan erat memerlukan sistem kelas dunia untuk memantau, mencegah dan (jika perlu) mengendalikan epidemik. Menyediakan barang publik berupa pencegahan penyakit dan pengelolaan bencana adalah prioritas regional yang paling utama.
- **Mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan.** Biaya kerusakan ekonomi yang timbul akibat kegiatan ekonomi menggunung seiring dengan pembangunan Asia yang pesat. Kerja sama diperlukan untuk menentukan standar lingkungan, merancang intervensi dan memantau hasil. Kerja sama regional dapat berguna bagi pengalihan sumber daya dan teknologi Asia dan non-Asia, dan penting untuk menangani isu lintas batas.

Berbagi tujuan regional seperti itu akan membantu membangun komunitas Asia yang unik. Melalui pemahaman keberhasilan dan kegagalan satu sama lain, masyarakat dan negara dapat membangun fondasi yang lebih kuat bagi kerja sama. Visi inklusif bersama juga akan membantu menggerakkan dukungan yang populer, suatu persyaratan penting untuk mewujudkan janji regionalisme.

7. Menciptakan arsitektur untuk kerja sama

Kerja sama regional yang lebih kuat itu luas, dalam dan merupakan keharusan. Mengumpulkan usaha kolektif di seluruh kawasan yang beragam dan luas ini merupakan tantangan besar. Contoh dari UE dan, sedikit banyak dari Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), menyoroti sebagian dari peluang dan kesulitan yang ada. Tetapi Asia tidak berfungsi persis seperti Eropa atau Amerika Utara. Perekonomian, politik dan sejarah Asia berbeda. Beberapa bentuk saling ketergantungan—dalam perdagangan, misalnya—lebih dalam di Asia sekarang ini daripada di Eropa pada tahap awal regionalisme Eropa. Tetapi bentuk-bentuk lain—seperti kebijakan moneter—banyak melibatkan keputusan nasional yang independen.

Dengan latar belakang itu, kajian mendapati bahwa

- Integrasi Asia tampaknya akan menguat tanpa meninggalkan pragmatisme dan gradualismenya yang khas;
- arsitektur kerja sama Asia akan tetap berada pada beragam jalur (*multitrack*) dan dengan beragam kecepatan (*multispeed*)—dan masih cair;
- kepemimpinan untuk mendorong maju regionalisme perlu datang dari koalisi yang luas;
- visi integrasi harus tetap pragmatis dan membuahkan hasil selangkah demi selangkah; dan
- Regionalisme Asia dapat menjadi lokomotif bagi integrasi global lebih lanjut.

Meskipun Asia dapat belajar dari pengalaman kawasan lain, regionalisme Asia pada akhirnya akan mengikuti cetak biru yang khusus, dibangun dari prioritas ekonomi Asia dan berdasarkan visi Asia untuk komunitas regional. Visi ini baru mulai terbentuk, disela-sela debat yang penuh semangat.

Regionalisme dengan karakteristik Asia

Negara-negara yang kuat dan pusat-pusat kegiatan ekonomi di Asia memiliki banyak prioritas yang sama, tetapi ada juga yang berbeda. Kadang kala perbedaan itu dipertajam dengan sejarah dan politik. Biaya terkait kerja sama adalah adanya kehilangan sebagian kedaulatan nasional dan menyempitnya

pilihan kebijakan untuk mencari tujuan nasional secara murni. Dapat dipahami kalau negara-negara besar yang sukses dan independen sulit membuat kompromi seperti itu, dan kemudian mengorbankan sebagian otoritasnya bagi institut regional. Tetapi pemahaman akan logika aksi kolektif regional sekarang kian menguat, didorong oleh kebutuhan untuk mengelola konsekuensi dari saling ketergantungan yang meningkat. Karena itu kerja sama tampaknya akan berkembang perlahan-lahan, tetapi akan menguat karena negara-negara yakin akan manfaat tindakan yang diselenggarakan dengan persetujuan bersama, dan proses pengambilan keputusan bersama. Kelompok-kelompok negara yang berbeda akan maju dengan kecepatan yang berbeda-beda, dengan menggunakan kerangka kerja yang juga berbeda untuk menangani rangkaian kepentingan kebijakan.

Regionalisme Asia juga akan menjadi berbeda dalam hal-hal lain. Gaya pembuatan keputusan kawasan ini pragmatis dan berhati-hati. Kerja sama ditujukan agar pasar bisa bekerja dengan lebih baik dan biasanya terbatas pada inisiatif dan tujuan yang khusus. Dialog antar pemerintah pada semua tingkat telah meningkat pesat, tetapi institusi formal regional secara relatif tetap kurang berkembang. Namun sudah banyak pengakuan akan perlunya peningkatan kemampuan institusional—misalnya ASEAN telah mempunyai komitmen untuk meningkatkan kapasitas sekretariatnya dan menerapkan cetak birunya yang baru untuk pendirian Komunitas Ekonomi ASEAN. Di beberapa sektor, biaya pembangunan insitusi regional cukup tinggi; kajian ini telah menetapkan, secara khusus, pendirian baik Dialog Stabilitas Keuangan Asia maupun Sekretariat Asia bagi Kerja Sama Ekonomi sebagai prioritas penting. Kedua institusi ini dan juga institusi lain yang akan muncul di kawasan ini nampaknya akan cenderung ramping, ditata dengan berhati-hati untuk mencapai maksud pembentukannya serta memiliki kewenangan terbatas. Dengan kata lain, bahkan dengan struktur institusional yang mendalam, konsultasi dan pembuatan keputusan antar pemerintah tampaknya akan tetap menjadi karakteristik utama dalam kerja sama regional Asia.

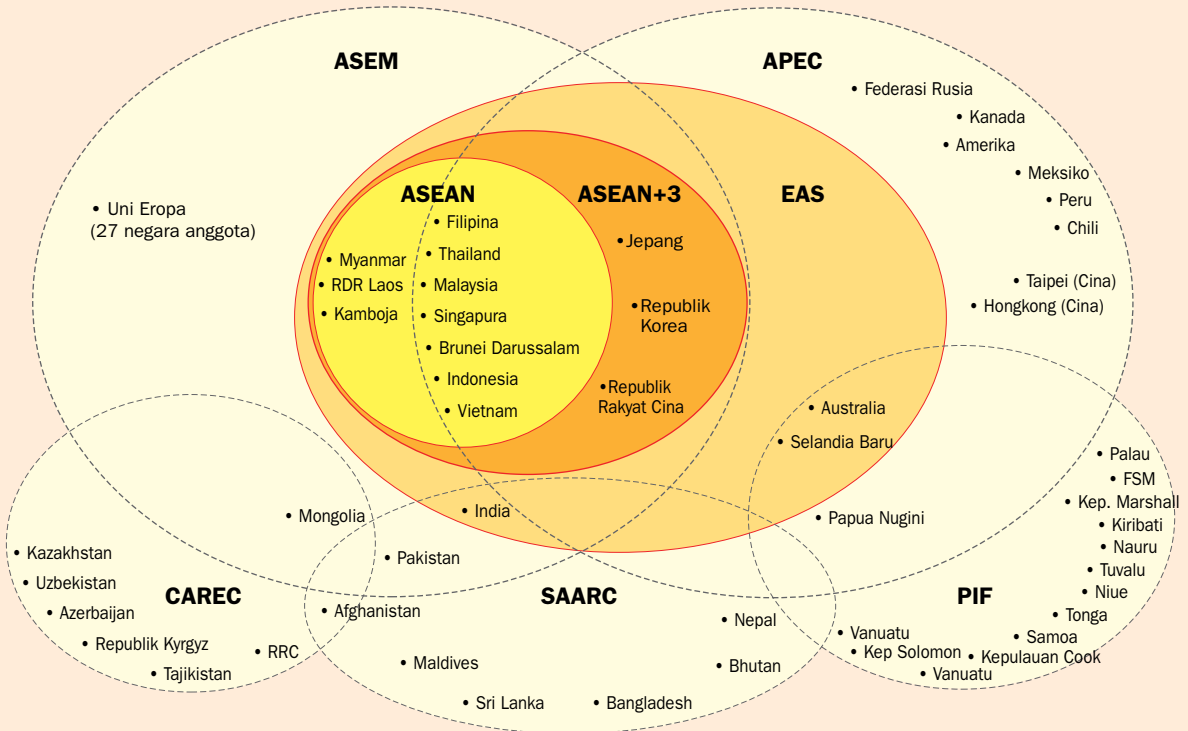
Arsitektur kerja sama

Agenda kebijakan regional Asia terlalu besar dan kompleks untuk dapat ditangani oleh satu institusi tunggal, terutama mengingat negara-negara Asia yang luas dan kepentingannya yang beragam.

Arsitektur yang fleksibel, dengan beragam jalur dan beragam kecepatan, akan menangani dengan baik tantangan ini. Ini akan menekankan intensifikasi kerja sama secara bertahap—keterlibatan dalam wilayah yang terbatas dahulu, baru kemudian diikuti dengan pendalaman dan perluasan jangkauan kerja sama. Hal ini akan memungkinkan setiap kelompok dari negara-negara untuk bergabung dalam proses integrasi dan berbagi dalam manfaatnya, tanpa memandang tingkat pembangunannya. Dengan menguatnya kemitraan, mereka dapat mengarah kepada kerja sama yang mendalam atau perluasan kelompok. Regionalisme

yang terbuka, bertahap, dan fleksibel akan memastikan bahwa integrasi ekonomi Asia akan tetap ramah pasar dan responsif terhadap konstituen kawasan yang beragam.

Diagram 10. Arsitektur ekonomi: forum regional dan transregional



APEC = Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik; ASEAN+3 = ASEAN plus 3 negara sebagaimana terlihat; ASEAN = Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara; ASEM = Pertemuan Asia-Eropa; EAS = Pertemuan Tingkat Tinggi Asia Timur; CAREC = Kerja Sama Ekonomi Regional Asia Tengah; FSM = Negara Federasi Mikronesia; RDR Laos = Republik Demokrasi Rakyat Laos; PIF = Forum Kepulauan Pasifik; RRC = Republik Rakyat Cina; SAARC = Asosiasi Asia Selatan Untuk Kerja Sama Regional.

Catatan:

ASEM mencakup Komisi Eropa sebagai anggota.

Untuk CAREC, keanggotaan RRC terfokus pada kawasan otonomi Xinjiang Uygur.

Sumber: ADB.

Yang penting, suatu kerangka kerja yang fleksibel memungkinkan pendatang baru dalam integrasi regional untuk mengembangkan hubungan sesuai dengan kemampuan mereka. Negara berkembang yang lebih kecil yang belum terintegrasi dengan penuh dalam ekonomi kawasan seringkali dapat memperoleh manfaat terbanyak dengan menjalankan pelajaran dinamika Asia. Bergabung dalam

jaringan produksi regional dan global dapat meningkatkan dengan dramatis produktivitas, ketenagakerjaan dan tingkat output mereka. Kajian ini mencoba memahami persyaratan dan implikasi integrasi. Pendatang baru dalam integrasi perlu mengadopsi dengan sungguh-sungguh kebijakan yang berorientasi keluar; pada gilirannya, sistem regional harus tetap dapat diakses oleh negara-negara yang terintegrasi.

Jangkauan kelompok utama kerangka kerja saat ini sangat beragam, dari organisasi subregional yang mencakup bagian-bagian dari sedikit negara hingga APEC and Pertemuan Asia-Eropa (ASEM), yang menjangkau institusi benua (Diagram 10). Keragaman ini konsisten dengan sasaran-sasaran kebijakan kawasan ini, yang perlu dicapai. Mengembangkan infrastruktur untuk menghubungkan masyarakat sekitar melalui hubungan transportasi dan energi, misalnya memerlukan kerja sama subregional yang terfokus dan terbatas. Pada saat yang sama, untuk memastikan bahwa pasar di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan bagian lain di dunia tetap terbuka bagi satu sama lain, diperlukan dialog di APEC, ASEM, dan tentu saja di institusi-institusi global. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana mempertahankan kelompok yang efektif dan fleksible sambil memastikan adanya logika dalam arah kebijakan mereka yang berbeda. Konsolidasi institutional bisa menjadi sesuatu yang berharga bagi proses ini—seperti yang direkomendasikan oleh kajian ini, misalnya, dalam bidang pengawasan ekonomi makro. Tetapi tumpang tindih dan persaingan antar kelompok tak selalu buruk; hal ini membuka banyak pilihan untuk menanggapi suatu masalah dan merangsang forum untuk lebih efektif.

Karena struktur kerja sama regional di Asia tetap cair, mengusulkan penugasan fungsi lembaga yang tegas merupakan hal yang terlalu dini.. Meskipun demikian, seperti yang diperlihatkan melalui argumentasi terinci dalam kajian ini, ASEAN+3 seringkali muncul sebagai penyelaras yang sangat berguna. Kerja sama ini diselenggarakan di sekitar ASEAN, yang memiliki pengalaman terbanyak dalam kerja sama dan mengoperasikan institusi-institusi regional yang paling maju. Ini juga menggabungkan tiga negara besar Asia (RRC, Jepang dan Republik Korea), dan secara umum terintegrasi dengan erat. Tetapi proses-proses yang dikoordinasikan oleh ASEAN+3 tak perlu dibatasi pada anggotanya. Misalnya, fungsi-fungsi yang harus terbangun dengan partisipasi lebih besar—misalnya Dialog Stabilitas Keuangan Asia yang diusulkan dalam kajian ini—dapat juga didukung oleh suatu struktur EAS. Meski proses kerja sama ini mungkin bermula dari struktur ASEAN+3, proses tak boleh berhenti sampai di sana. Harus melibatkan hubungan saling melengkapi yang erat dengan forum regional yang lain, yang sejarah dan keanggotaannya yang unik dapat menyumbangkan keahlian untuk menangani aspek-aspek kerja sama lainnya. Karena itu perlu dipelihara sekian banyak ketentuan regional dan hubungan baik di antara mereka. Misalnya, ASEAN akan merupakan ajang pembuktian yang sangat efektif bagi bentuk-bentuk kerja sama regional yang lebih maju. Ini akan menjadi pusat jaringan yang semakin efektif karena ASEAN sendiri mengusahakan integrasi yang lebih dalam, menyusul diadopsinya Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (Kawai 2007) baru-baru ini. Kerangka kerja Greater Mekong Subregion—sebuah

kelompok subregional—menjadi laboratorium yang ideal bagi pembangunan infrastruktur dan bagi inisiatif baru yang menargetkan bidang-bidang seperti pemberantasan kemiskinan. EAS mungkin terbukti sebagai forum paling efektif untuk menghadapi perubahan iklim dan tantangan lingkungan lain dari perspektif Asia. Dan mengingat keanggotaannya, APEC dapat menjadi efektif dalam fasilitasi perdagangan. APEC dan ASEM juga dapat memegang peran yang berguna dalam dialog kebijakan mengenai kebijakan peraturan domestik dan dalam memastikan bahwa peran global yang meluas dari kawasan ini dikelola dengan efektif (Tabel 8, hal. 58-59).

Arsitektur yang fleksibel dengan beragam jalur juga menanggapi tantangan keragaman politik, ekonomi dan budaya yang luar biasa dari kawasan ini. Ekonomi dan politik Asia tak selalu bersekutu, tetapi mereka saling tergantung. Kepentingan ekonomi membentuk posisi politik seperti halnya kemauan politik mempengaruhi hasil ekonomi. Kerja sama ekonomi yang lebih erat dalam Asia akan memberikan kerangka kerja yang lebih kuat untuk mengelola penyesuaian ekonomi di masa mendatang, baik dalam kawasan ini maupun dengan dunia. Yang menonjol di antaranya adalah bangkitnya RRC dan India, yang mempengaruhi pasar regional dan global secara luas.

Selama manfaat ekonomi dari integrasi regional sangat berarti, kompromi politik dimungkinkan. Suatu survei untuk kajian ini mengkonfirmasi bahwa pemimpin opini kawasan ini menyambut keterlibatan regional dan optimis bahwa hambatan politik dapat diatasi (Capannelli 2008). Pendekatan Asia berasal dari—dan dengan rapi mengakomodasi—keragamannya. Pendekatan itu memungkinkan negara-negara untuk tetap menguasai sebagian besar kemerdekaannya dan mengendalikan urusan internal mereka, namun juga mengembangkan rasa komunitas—intinya, saling percaya dan yakin.

Kepemimpinan

Kerja sama yang bertahap dan dari bawah ke atas memiliki keuntungan ekonomi dan politik, tapi juga mengandung resiko, termasuk kemungkinan adanya ketidak-konsistenan di antara inisiatif-inisiatif, dan kemajuan yang mungkin lebih lambat dibandingkan dengan pendekatan dari atas ke bawah. Kekuatan apakah yang akan menggerakkan momentum dan tekanan bagi integrasi yang dalam dan ambisius?

Pada tingkat pemerintahan tertinggi, pentingnya kerja sama regional ini diterima dengan baik—pemimpin Asia telah berulang kali dan dengan jelas menegaskan komitmen mereka untuk bekerja sama.¹⁵ Tetapi mereka perlu mekanisme yang efektif untuk menerjemahkan maksud ini ke dalam hasil yang pragmatis. Institusi regional Asia belum cukup kuat untuk mengambil peran

¹⁵ Laporan Kelompok Visi Asia Timur (2001) dan Kelompok Kajian Asia Timur (2002), ditugaskan oleh para pimpinan, menawarkan ringkasan yang sangat bagus mengenai potensi usaha kerja sama regional dan memberikan panduan bagi kajian ini.

kepemimpinan; banyak yang bekerja dengan sumber daya sangat terbatas dan sering kali dengan staf yang menjalani penugasan singkat dan tidak tetap. Dalam konteks ini, institusi yang membangkitkan pengetahuan di luar ranah resmi memainkan peran amat penting. Ide berperan penting dan lembaga-lembaga pemikiran serta universitas-universitas di kawasan ini memiliki struktur dan waktu untuk berfokus pada isu-isu jangka panjang dan menawarkan nasehat yang obyektif.

Di masa mendatang, masyarakat madani akan merupakan sumber dukungan terpenting. Survei untuk kajian ini mendapati bahwa pemimpin opini Asia dari berbagai kalangan menyambut baik kerja sama internasional. Semua kebangsaan dan kelompok tampaknya memiliki perspektif ini, termasuk para eksekutif bisnis; profesional; jurnalis, pakar di universitas, dan lembaga penelitian serta analis ekonomi. Mereka menyambut identitas Asia, dan makin banyak melakukan interaksi dengan rekan-rekan mereka di kawasan ini dalam jaringan profesional, pendidikan dan resmi. Kerja sama dan persahabatan mereka dapat menginformasikan strategi regional dan menyediakan landasan bagi kerja sama di masa yang akan datang.

Pendek kata, regionalisme Asia akan memerlukan kepemimpinan pejabat yang canggih dan juga jagoan perorangan. Ini memerlukan dukungan dari banyak orang yang mempunyai visi dan keteguhan—termasuk politisi, pengusaha dan pemimpin madani; pakar akademisi, dan intelektual—masyarakat dari segala lapisan dan mewakili keragaman budaya yang besar dari kawasan ini. Tantangan bagi pemerintah adalah merangkul koalisi yang luas ini, untuk menyediakan forum agar suaranya dapat didengar, dan untuk memastikan bahwa dampaknya terasa

Kemitraan untuk kemakmuran bersama

Lebih mudah, dalam beberapa hal, membayangkan Asia yang sudah berintegrasi dalam beberapa dekade ke depan daripada menggambarkan secara rinci tujuan yang dapat dicapai menjelang 2020. Pada masa mendatang, Asia tampaknya bakal mempunyai pasar tunggal dengan peraturan bersama, mata uang bersama, dan kebebasan besar bagi pergerakan pekerja—dengan kata lain, suatu lingkungan mirip dengan UE saat ini. Asia yang sudah berintegrasi akan menanggung manfaat besar dari banyaknya keragaman negara dan bangsa di kawasan ini, warisan budaya yang kaya; luasnya skala sumber daya keuangan, teknik dan lainnya dan gabungan kemampuannya untuk mengelola ancaman ekonomi, sosial, lingkungan dan lainnya. Asia akan menawarkan kesempatan yang tak tertandingi bagi inovasi, kewiraswastaan, dan perniagaan. Dan ia akan membantu mengendalikan rivalitas politik yang dapat mengancam kestabilan.

Visi itu dapat memberikan inspirasi dan menawarkan panduan untuk arahan jangka panjang. Tetapi untuk jangka pendek, visi ini harus diterjemahkan menjadi langkah-langkah yang dapat—dan harus—dicapai dalam jangka waktu menengah. Visi yang memberikan motivasi bagi langkah-langkah ini harus pragmatis. Harus terdiri dari inisiatif yang realistis yang menunjukkan hasil awal lebih cepat, langkah demi langkah. Laporan ini telah menunjukkan pilihan-pilihan yang penting. Dengan

mengikuti sebagian dari pilihan tersebut, menjelang 2020 Asia akan memiliki:

- suatu pasar terpadu yang bebas dari hambatan terhadap aliran barang, jasa dan modal regional;
- pasar-pasar keuangan yang cair, dalam dan terbuka bagi aliran keuangan lintas batas, dengan standar pengawasan yang tinggi dan perlindungan yang kuat untuk investor nasional dan asing;
- kerangka kerja yang efektif untuk mengkoordinasikan kebijakan ekonomi makro dan kebijakan nilai tukar, mengingat tantangan global dan keadaan nasional yang berbeda-beda;
- upaya kolektif untuk menangani isu-isu sosial yang vital, seperti kemiskinan, eksklusi, ketidakstabilan penghasilan, migrasi, ketunaan, kesehatan, dan ancaman lingkungan;
- suara yang konsisten untuk memproyeksikan keprihatinan negara-negara Asia dalam forum kebijakan global dan mendorong tata kelola global yang bertanggungjawab; dan
- institusi vital, dengan staf yang memadai dan sangat profesional, untuk menyediakan dukungan analisa terbaik dan logistik bagi usaha ini.

Tabel 8. Forum kerja sama ekonomi utama di Asia dan Pasifik

Nama, Tahun berdiri	Keanggotaan
Dialog Kerja Sama Asia (ACD) 2002	Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Bhutan, Kamboja, Rep. Rakyat Cina, India, Indonesia, Iran, Jepang, Kazakhstan, Rep. Korea, Kuwait, RRD Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Federasi Rusia, Saudi Arabia, Singapura, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Uni Emirat Arab, Uzbekistan dan Vietnam
Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 1989	Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chili, RRC, Hongkong (Cina), Indonesia, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Republik Korea, Rusia, Singapura, Taipei (Cina), Thailand, Amerika Serikat, Vietnam.
Pertemuan Asia-Eropa (ASEM) 1996	Anggota ASEAN, Anggota Uni Eropa, Komisi Eropa, RRC, India, Jepang, Rep. Korea, Mongolia, dan Pakistan.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN, 1967)	Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, RRD Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Singapura, Vietnam.
ASEAN Plus Tiga (ASEAN+3, 1997)	Anggota ASEAN, RRC, Jepang, Republik Korea.

Tujuan itu menantang tapi dapat dicapai. Harus ada perhatian lebih awal terhadap sebagian dari tujuan itu; kerja sama untuk memastikan stabilitas keuangan dan penyesuaian yang mulus terhadap ketimpangan global merupakan hal yang sangat mendesak.

Setiap langkah menuju integrasi regional akan memerlukan inovasi, kepemimpinan, dan dukungan dari negara-negara besar. Asia berada dalam keadaan seimbang untuk mengambil langkah-langkah ini: perekonomiannya sehat dan menikmati hubungan baik satu sama lain dan dengan pusat-pusat global. Dengan mantap, regionalisme Asia menjadi makin percaya diri akan potensinya untuk memberikan sumbangan pada kesejahteraan baik di Asia maupun global. Semua ini berpihak pada munculnya masyarakat ekonomi Asia yang kuat, makmur dan berorientasi ke luar, terpadu secara regional, tetapi juga terhubung dengan pasar global, dan dengan tanggung jawab dan pengaruh yang sesuai dengan bobot ekonominya. Pendek kata, kebangkitan regionalisme Asia adalah kemitraan yang dapat menjamin kemajuan yang damai dan berlanjut dari kawasan ini, dan membantu mengupayakan kemakmuran bersama secara global dan regional.

Bidang fokus	Prakarsa utama
<ul style="list-style-type: none"> • Teknologi • Pariwisata • Perdagangan dan investasi • Sektor Keuangan • Energi • Kesehatan dan pendidikan • Politik • Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan tahunan para menteri • Proyek di 19 bidang, termasuk kerja sama antara anggota • Lembaga "think tank" (simposium dan jaringan) untuk mendukung proyek ACD
<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Bisnis • Kerja Sama Ekonomi dan Teknis • Liberalisasi Perdagangan dan Investasi <ul style="list-style-type: none"> • Isu-isu kultural dan intelektual • Reformasi Keuangan dan Sosial • Isu-isu Politik • Mengurangi hambatan perdagangan dan investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan Bogor akan "perdagangan serta investasi bebas dan terbuka " • Kartu Perjalanan Bisnis APEC • Praktek Terbaik bagi RTA dan FTA, • Deklarasi Mengenai Perubahan Iklim, Keamanan Energi dan Pembangunan Bersih <ul style="list-style-type: none"> • Kerangka Kerja Kerja Sama Asia-Eropa • Yayasan Asia-Eropa • Jejaring Informasi Trans-Eurasian
<ul style="list-style-type: none"> • Kerja Sama Ekonomi • Perdagangan dan Investasi • Keamanan Regional • Pertukaran Sosio-Kultural 	<ul style="list-style-type: none"> • Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara • Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN • Komunitas Ekonomi ASEAN • Komunitas Keamanan ASEAN • Komunitas Sosial dan Budaya ASEAN
<ul style="list-style-type: none"> • Keuangan • Ekonomi Makro 	<ul style="list-style-type: none"> • Ulasan Ekonomi dan Dialog Kebijakan • Prakarsa Chiang-Mai • Prakarsa Pasar Obligasi Asia • Kelompok Riset

bersambung

Tabel 8. Forum kerja sama ekonomi utama di Asia dan Pasifik (bersambung)

Nama, Tahun berdiri	Keanggotaan
Prakarsa Teluk Bengal untuk Kerja sama Teknis dan Ekonomi Multi Sektor (BIMSTEC) 1997	Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka dan Thailand
Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Filipina (BIMP-EAGA) 1994	Brunei Darussalam, provinsi-provinsi Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
Kerja Sama Ekonomi Regional Asia Tengah (CAREC) 1997	Afghanistan, Azerbaijan, provinsi-provinsi RRC, Kazakhstan, Republik Kyrgyz, Mongolia, Tajikistan, Uzbekistan.
Pertemuan Puncak Asia Timur (EAS) 2005	Anggota ASEAN, Australia, RRC, India, Jepang, Republik Korea dan Selandia Baru.
Subwilayah Mekong Raya (GMS) 1992	Kamboja, dua provinsi RRC, Republik Rakyat Demokrasi Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam.
Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) 1993	Provinsi-provinsi di Indonesia, Malaysia dan Thailand.
Forum Kepulauan Pasifik (PIF) 1971	Australia, Kepulauan Cook, Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.
Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) 2001	Republik Rakyat Cina, Kazakhstan, Republik Kyrgyz, Rusia, Tajikistan dan Uzbekistan
Asosiasi Asia Selatan Bagi Kerja Sama Regional (SAARC) 1985	Afghanistan, Banglades, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.

Bidang fokus	Prakarsa utama
<ul style="list-style-type: none"> • Transportasi • Pariwisata • Perdagangan dan Investasi • Energi • Kesehatan • Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghubungkan Asia Selatan-Asia Tenggara • Komitmen liberalisasi perdagangan tahun 2012 (3 anggota) • Rencana pakta perdagangan bebas tahun 2017
<ul style="list-style-type: none"> • Agro-industri • Lingkungan hidup • Pariwisata • Transportasi • Energi • Fasilitasi Perdagangan • Kebijakan Perdagangan • Transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peta Jalan bagi Pembangunan (2006-2010) • Persetujuan transportasi udara, transportasi lain, fasilitas perdagangan dan pariwisata. • Rencana Aksi Komprehensif (CAP 2006) • Strategi Fasilitasi Transportasi dan Perdagangan • Institut Pusat Lingkungan Hidup Regional Asia Tengah (CAREC)
<ul style="list-style-type: none"> • Komunitas Ekonomi • Energi dan Lingkungan Hidup • Perdagangan dan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Deklarasi Perubahan Iklim, Energi dan Lingkungan Hidup • Deklarasi Keamanan Energi Asia Timur
<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Lingkungan Hidup • Pengembangan Sumber Daya Manusia • Pariwisata • Perdagangan dan Investasi • Transportasi, Energi, Telekomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Koridor Ekonomi Timur-Barat • Kerangka Kerja Strategis Sepuluh Tahun
<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian dan Perikanan • Lingkungan Hidup • Pengembangan Sumber Daya Manusia • Pariwisata • Perdagangan dan Investasi • Infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Peta Jalan IMT-GT untuk mempromosikan perdagangan dan investasi, pertanian, agroindustri, pariwisata, infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia,abilitas tenaga kerja, manajemen sumber daya alam. • Promosi Pariwisata Bersama
<ul style="list-style-type: none"> • Energi • Teknologi Informasi dan Komunikasi • Transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Pasifik Mengenai Hubungan Ekonomi yang Lebih Erat • Kantor Penerbangan dan Keselamatan Pasifik • Persetujuan Perdagangan Negara-Negara Pulau Pasifik
<ul style="list-style-type: none"> • Isu Politik • Kebudayaan dan Pendidikan • Energi dan Transportasi • Perlindungan Lingkungan Hidup • Ilmu Pengetahuan dan Teknologi • Perdagangan dan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Aksi tentang implementasi program bagi perdagangan multilateral dan kerja sama ekonomi • Struktur Antiteroris Regional • Dewan Usaha SCO dan Konsorsium Antarbank
<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian dan Pengembangan Pedesaan • Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Kesehatan dan Kependudukan • Pengembangan Sumber Daya Manusia • Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Meteorologi • Transportasi • Perempuan, Remaja dan Anak-Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Pembangunan Asosiasi Asia Selatan Bagi Kerja Sama Regional (SAARC) • Kawasan Perdagangan Bebas Asia Selatan

Daftar Pustaka

- ADB-UNESCAP-UNDP (Asian Development Bank, United Nations Economic and Social Commission for Asia, and United Nations Development Programme). 2007. *The MDGs: Progress in Asia and the Pacific*. Manila.
- Ando, M., and K. Kimura. 2003. *The Formation of International Production and Distribution Networks in East Asia*. Working Paper 10167. Cambridge MA: National Bureau of Economic Research (NBER).
- ARIC (Asian Regional Integration Center). 2007. FTA Database. Available: <http://www.aric.adb.org>.
- Asian Development Bank. 1997. *Emerging Asia: Changes and Challenges*. Manila.
- . 2003a. *Monetary and Financial Integration in Asia: The Way Ahead*, Volumes 1 and 2. Manila.
- . 2003b. *Social Protection: Our Framework, Policies, and Strategies*. Manila.
- . 2005a. *Asian Economic Cooperation and Integration: Progress, Prospects, and Challenges*. Manila.
- . 2005b. *Key Indicators 2005: Poverty in Asia: Estimates and Projections*. Manila.
- . 2006. *Regional Cooperation and Integration Strategy*. Manila.
- . 2007a. *ADB's Infrastructure Operations: Responding to Client Needs*. Manila.
- . 2007b. *Key Indicators 2007: Inequality in Asia*. Manila.
- . 2007c. *Towards a New Asian Development Bank in a New Asia: Report of the Eminent Persons Group to the President of the Asian Development Bank*. Manila.
- . 2008. *Asian Development Outlook 2008*. Manila.
- Asian Bonds Online. 2007. <http://asiabondsonline.adb.org>. Accessed: December 2007
- Athukorala, P. C., and N. Yamashita. 2005. *Production Fragmentation and Trade Integration: East Asia in a Global Context*. Canberra: Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University.
- Baldwin, R. E. 2006. *Managing the Noodle Bowl: The Fragility of East Asian Regionalism*. March, *CEPR Discussion Paper* No. 5561. Geneva: Centre for Economic Policy Research.
- Barro, R. 2008. *Inequality and Growth Revisited*. Working Paper Series on Regional Economic Integration No. 11, Office of Regional Economic Integration, Asian Development Bank. Available: http://aric.adb.org/pdf/workingpaper/WP11_%20Inequality_and_Growth_Revisited.pdf.
- BIS (Bank for International Settlements). 2008. Available : <http://www.bis.org/statistics/>.
- Blauch, B., A. Weber, and J. Wood. 2006. Developing a Social Protection Index in Asia. *Development Policy Review* 24(1): 5–29.
- Bloomberg. Available: <http://bloomberg.com>.

- Capannelli, G. 2008. Increasing Economic Interdependence in Asia: A Perception Survey. Working Paper Series on Regional Economic Integration (forthcoming). Manila: ADB.
- Chaudhuri, S., and M. Ravallion. 2007. Partially Awakened Giants: Uneven Growth in China and India. In *Dancing with the Giants: China, India, and the Global Economy*, edited by S. Yusuf and A. Winters. Washington DC: World Bank.
- Chinn, M. D., and H. Ito. 2007. *A New Measure of Financial Openness*. Available: <http://www.lafollette.wisc.edu/publications/workingpapers/chinn2007-033.pdf>.
- City of London Corporation. 2007. Global Financial Centers Index. Available: http://www.cityoflondon.gov.uk/Corporation/business_city/research_statistics/GFCI.htm. Accessed: December.
- Dee, P. 2008. The Institutional Foundations of Economic Reform in Asia and the Pacific. New York and London: Routledge (forthcoming).
- Drysdale, P. D. 2006. Regionalism in Asia and the Pacific and an Asian Economic Community, Presentation to a Workshop at the Indian Council for Research in Economic Relations (ICRIER), New Delhi, 30 March.
- EABER (East Asian Bureau of Economic Research). 2007. Institutional Strategies for Improving the Micro Economic Policy Foundations in East Asia. (forthcoming). Available: <http://www.eaber.org>.
- East Asia Study Group. 2002. Final Report of the East Asia Study Group. Paper submitted to the ASEAN+3 Summit, 4 November 4, Phnom Penh.
- East Asia Vision Group. 2001. Towards an East Asian Community—Region of Peace, Prosperity and Progress.
- Economist Intelligence Unit. 2008. *Country Report*. Available: <http://www.eiu.com/>. Accessed: Jan 2008.
- Eichengreen, B. 2006. The Parallel-Currency Approach to Asian Monetary Integration. *American Economic Review* 96 (May): 432–36.
- Felipe, J., and R. Hasan, eds. 2006. *Labor Markets in Asia: Issues and Perspectives*. London: Palgrave Macmillan.
- Feridhanusatyan, T. 2005. *Preferential Trading Agreements in the Asia-Pacific Region*. IMF Working Paper Series WP/05/149. July.
- Freeman, R. 2006. People Flows in Globalization. *Journal of Economic Perspectives* 20(2): 145–70.
- Garcia-Herrero, A., and P. Wooldridge. 2007. Global and Regional Financial Integration: Progress in Emerging Markets. *BIS Quarterly Review*. September: 57–69.
- Gill, I., and H. Kharas. 2007. *An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth*. Washington, DC: World Bank.
- Global Commission on International Migration. 2005. *Migration in an Interconnected World: New Directions for Action*. Available: <http://www.gcim.org/attachements/gcim-complete-report-2005.pdf>
- He, F. 2007. China's Economic Reform: Success, Problems and Challenges. *EABER Working Paper*, No. 19. East Asian Bureau of Economic Research. February.
- Hiratsuka, D., ed. 2006. *East Asia's De Facto Economic Integration*. London: Palgrave MacMillan.
- IMF (International Monetary Fund). 2007a. Coordinated Portfolio Investment Survey. Available: <http://www.imf.org/external/np/sta/pi/cpis.htm>.

- Accessed: December.
- 2007b. Direction of Trade Statistics. Available: <http://www.imf.org>. Accessed: December.
- 2007c. International Financial Statistics. Available: <http://www.imfstatistics.org/> Accessed: December.
- 2008. *World Economic Outlook Update, January 2008*. Washington, DC. Available: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/update/01/pdf/0108.pdf>.
- Ito, T. 2007. Asian Currency Crisis and the International Monetary Fund, 10 Years Later: Overview. *Asian Economic Policy Review*. 2:16–49
- Kapsos, S. 2006. The Employment Intensity of Growth: Trends and Macroeconomic Determinants. In *Labor Markets in Asia: Issues and Perspectives*, edited by J. Felipe and R. Hasan. London: Palgrave Macmillan.
- Kawai, M. 2005. East Asian Economic Regionalism: Progress and Challenges. *Journal of Asian Economics* 16: 29–55.
- 2007. Evolving Economic Architecture in East Asia. *Kyoto Economic Review* 76(1): 9–52.
- 2008. An Asian Currency for an Integrated Asia. Paper presented at the ADB-EC joint conference, European and Asian Integration: Achievements and Challenges. 10 March, Brussels.
- Kawai, M., and T. Motonishi. 2005. Macroeconomic Interdependence in East Asia: Empirical Evidence and Issues. In *Asian Economic Cooperation and Integration*. Manila: ADB.
- Kawai, M., and G. Wignaraja. 2008. Regionalism as an Engine of Multilateralism: A Case for a Single East Asian FTA. Working paper series on regional economic integration. 14 February. Manila: ADB.
- Kim, S., and J-W. Lee. 2008. Real and Financial Integration in East Asia (forthcoming). Working Paper Series on Regional Economic Integration (forthcoming). Manila: ADB.
- Kuroda, H., and M. Kawai. 2002. Strengthening Regional Financial Cooperation. *Pacific Economic Papers* No. 332 (October).
- Lardy, N. R. 2007. China: Rebalancing Economic Growth. In *The China Balance Sheet in 2007 and Beyond*. Washington: Center for Strategic and International Studies and the Peterson Institute for International Economics.
- Lee, J-W. 2008. Patterns and Determinants for Cross-Border Financial Asset Holdings in East Asia. Working Paper Series on Regional Economic Integration (forthcoming). Manila: ADB.
- Lee, J-W., and W. McKibbin. 2003. *Globalization and Disease: The Case of SARS*. Working Papers in Trade and Development No. 2003/16. Canberra: Australian National University.
- Lin, T., F. de Guzman, and Ma. C. Cuevas. 2007. *Flood Insurance as a Flood Management Tool: An Economic Perspective*. ADB Economics and Research Department Working Paper No. 99.
- McKinnon, R., and G. Schnabl. 2002. *Synchronized Business Cycles in East Asia: Fluctuations in the Yen/Dollar Exchange Rate and China's Stabilizing Role*. Stanford University Department of Economics Working Papers 02010.
- Menon, J. 2007. Bilateral Trade Agreements. *Asia Pacific Economic Literature* 21(2): 29–47(19).

- Naya, S., and M. Plummer. 2005. The Economics of the Enterprise for ASEAN Initiative. Available: <http://aric.adb.org/pdf/workingpaper/WP1%20Plummer%20230706.pdf>.
- Oxford Economics. 2008. Forecasting and Analysis. Available: http://www.oef.com/OE_FA_Int_Mac.asp. Accessed: February 2008.
- Park, D. 2008. Globalization, erosion of tax base, and the revenue potential of developing Asia's foreign exchange reserve build-up. Paper presented at the International Symposium, Tax Reform in the Globalization Era: World Trend and Japan's Choice. 22–23 February, Tokyo.
- Park, Y. C., and K. H. Bae. 2002. Financial Liberalization and Economic Integration in East Asia. Paper presented to the PECC Forum Conference: Issues and Prospects for Regional Cooperation for Financial Stability and Development. 11–13 August, Honolulu.
- Petri, P. A. 2006. Is East Asia becoming more interdependent? *Journal of Asian Economics* 17: 381–94.
- Plummer, M. G. 2002. The EU and ASEAN: Real Integration and Lessons in Financial Cooperation. *The World Economy* 25: 1469–500.
- Pritchett, L. 2007. Bilateral Guest Worker Agreements: A Win-Win Solution for Rich Countries and Poor People in the Developing World. CGD Brief. Available: aric.adb.org/.../Session6_Report%20Chapter%206_S.Chatterjee%20&%20A.Orbeta%20Jr._29oct07.doc
- Radelet, S., and J. Sachs. 1998. *The East Asian Financial Crisis: Diagnosis, Remedies, Prospects*. Brookings Papers on Economic Activity. Washington, DC: Brookings Institute.
- Soesastro, H. 2006. Regional Integration in East Asia: Achievements and Future Prospects. *Asian Economic Policy Review* 1: 215–34.
- UN (United Nations). 2007. *UN World Economic and Social Survey 2007*. Available: www.un.org/esa/policy/wess/wess2007files/wess2007.pdf
- UNCTAD (United Nations Commission for Trade and Development). 2007. *Trade and Development Report*. New York and Geneva.
- . 2007. FDI Statistics. Available: <http://www.unctad.org>. Accessed: December.
- United Nations Population Division. 2006. *World Population Prospects: The 2006 Revision*. Available at: <http://esa.un.org.unpp/>.
- United Nations World Tourism Organization. Available: <http://www.world-tourism.org/>
- Whalley, J., and S. Zhang. 2007. A Numerical Simulation Analysis of (Hukou) Labor Mobility Restrictions in China. *Journal of Development Economics* 83: 392–410.
- World Bank. 1993. *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy*. Policy Research Report. Washington, DC.
- . 2007. *World Development Indicators*. Washington, DC.
- World Federation of Exchanges. 2007. Available: <http://www.world-exchanges.org/>. Accessed: November.
- Yang, D. 2006. *International Migration, Remittances, and Household Investment: Evidence from Philippine Migrants' Exchange Rate Shocks*. Working paper 12325. Cambridge Ma: National Bureau of Economic Research.

